PERUBAHAN

RENCANA STRATEGIS

Tahun 2023 - 2026

Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Banten

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten periode 2023-2026 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk 4 (empat) tahun kedepan, yang disusun berdasarkan sistematika penyusunan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Renstra ini juga disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten 2023-2026 yang memuat Visi, Misi, Program Prioritas.

Renstra ini disusun sebagai implementasi dari tahapan 4 (empat) tahunan guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan penyusunan Renstra ini dapat menjadi acuan dalam proses perencanaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten secara terintegrasi, sinergis dan sejalan dengan tugas dan fungsi untuk mendukung capaian prioritas nasional dan prioritas daerah yang telah dicanangkan. Serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.

Semoga dokumen Perubahan Renstra periode 2023-2026 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

PLT KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI BANTEN

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Drs. E.A. DENI HERMAWAN., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19671228 199312 1 00 1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR GAMBAR		iv
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Ruang Lingkup	5
	1.3 Landasan Hukum	10
	1.4 Maksud dan Tujuan	12
	1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II	**GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BANTEN**	14
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Pendapata	14
	2.2 Sumber Daya Manusia Bapenda Provinsi Banten.....	40
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	44
	2.4 Data Statistik Sektoral Tahun 2018-2021.....	46
BAB III	**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BANTEN**	51
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan	51
	3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026.....	67
	3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Perangkat Daerah.....	70
BAB IV	**TUJUAN DAN SASARAN**	
	4.1 Tujuan	74
	4.2 Sasaran	74
BAB V	**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**	76
BAB VI	**RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN**	82
BAB VII	**KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN**	114
BAB VIII	**PENUTUP**	116
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.1:Komposisi Data Realisasi Penerimaan Pkb Th.2017(53)

Tabel 3.1.2:Komposisi Data Realisasi Penerimaan Pkb Th.2018(53)

Tabel 3.1.3: Komposisi Data Realisasi Penerimaan Pkb Th.2019(54)

Tabel 3.1. 4: Komposisi Data Realisasi Penerimaan Pkb Th.2020(54)

Tabel 3.1.5: Komposisi Data Realisasi Penerimaan Pkb Th.2021(54)

Tabel 3.1.5: Komposisi Data Realisasi Penerimaan Bbnkb Th.2017(58)

Tabel 3.1.6: Komposisi Data Realisasi Penerimaan Bbnkb Th.2018(59)

Tabel 3.1.7: Komposisi Data Realisasi Penerimaan Bbnkb Th.2019(59)

Tabel 3.1.8: Komposisi Data Realisasi Penerimaan Bbnkb Th.2020(59)

Tabel 3.1.9: Data Rekapitulasi Potensi Kendaraan Perjenis S/D Tahun 2021(66)

Tabel 3.1.10; Data Rekapitulasi Potensi Kendaraan Perjenis Dari Tahun S/D Tahun 2021(66)

Tabel 3.2.1: Identifikasi Pemetaan Permasalahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten(69)

Tabel 3.3.1: Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024(71)

Tabel 3.3.2: Data Rekapitulasi Potensi Kendaraan Perjenis Dari Tahun S/D Tahun 2021(72)

Tabel 4.4.1: Kerangka Kerja Logis Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Bapenda Provinsi Banten(75)

Tabel 5.5.1: Strategi Dan Kebijakan Visi, Misi Rpd Provinsi Banten 2023-2026(77)

Tabel 6.6.1: Pagu Indikatif Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Selama Kurun Waktu Tahun 2023-2026(84)

Tabel 7.1.1: Indikator Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 S/D 2026(115)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2 :Hubungan Antar Dokumen Peren(7)

Gambar 2.1.1: Struktur Organisasi No 47 TH 2022(36)

Gambar 2.1.2: peta sebaran UPTD PPD/gerai samsat(39)

Gambar 2.1.3: struktur oragnisasi UPTD PPD(40)

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan diterbitkanya amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, di mana salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Bagi daerah yang mengalami masa transisi agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah periode 2023-2026. Nomenklatur dokumen dimaksud adalah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. RPD Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang disusun secara teknokratis.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terlihat suatu upaya pemerintah (Pusat) dalam mencanangkan perubahan paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efesien, dan bersasaran. Perubahan tersebut diantaranya menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan dokumen perencanaan sebagai acauan penyelenggaraan pembangunan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu empat tahunan maupun tahunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pada Pasal 151 Ayat 1 bahwa " ***Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra OPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan,***

Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman padaRPDDaerah dan bersifat indikatif" dan juga berdasarkan undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai ***"Renstra OPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun"***.

Sebagai dasar dalam proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 didalamnya turut mengandung pengaturan tentang penyusunan dan penetapan Renstra OPD sebagai suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPD Daerah, dimana tahapan-tahapan pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah dan arah kebijakan keuangan daerah (Pasal 14 Ayat 2);
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal SPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3);
3. Kepala Bappeda menyusun rancangan RPD dengan menggunakan rancangan Renstra OPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 Ayat 4);
4. Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 17 Ayat 2);
5. Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah (Pasal 18 Ayat 2);
6. RPJM Daerah ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 19 Ayat 3);

7. Renstra OPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPD (Pasal 19 Ayat 4).

Seiring Organisasi Perangkat Daerah memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan diubah menjadi **BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BANTEN.** Sebelum diterbitkan Peraturan Pemerintah tersebut Badan Pendapatan Daerah , masih berbentuk Dinas Pendapatan Provinsi Banten (Perda Nomor 13 Tahun 2002). Kemudian terjadi perubahan SOTK (mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007) sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008 diubah menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dengan menggabungkan 3 Instansi yang tediri dari Dinas Pendapatan Daerah, Biro Keuangan Setda Provinsi Banten dan Satu Bagian dari Biro Perlengkapan Setda Provinsi Banten. Pada tahun 2012 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 diubah lagi menjadi Badan Pendapatan Daerah dengan memisahkan Bagian Aset masuk kedalam Biro Perlengkapan yang merupakan bagian dari Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016) serta Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pendapatan daerah, Penyelarasan ini di sesuaikan dengan nama OPD dan menjamin konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai upaya pencapaian indikator kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPD Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026.

Dalam penyusunan Renstra OPD harus berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mencakup;

1. Pendahuluan;
2. Gambaran Pelayanan OPD;
3. Permasalahan dan Isu-isu Strategi berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
4. Tujuan dan Sasaran;
5. Strategi dan arah kebijakan;
6. Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan;
7. Kinerja penyelenggaran bidang urusan; Dan
8. Penutup.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Banten yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah. Sebagai salah satu perangkat daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsi dalam jangka waktu lima tahunan . Dan juga berfungsi sebagai pedoman dalam;

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dan perencanaan anggaran.
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara pemerintah Provinsi Banten dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dan Unit Pelaksanan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026 disusun melalui tahapan pembentukan tim, pengumpulan data, menganalisa dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Provinsi Banten.

Sesuai dengan amanat perundangan, dan seiring dangan diterbitkanya **RPD Teknokratik Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026** maka Badan Pendapatan Daerah memutuskan pentingnya menyusun Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten tahun 2023 - 2026 dan disesuaikan dengan diterbitkanya Peraturan Gubernur Banten tentang Uraian Tugas dan Fungsi OPD. Renstra OPD merupakan dokumen perencanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten untuk periode 4 (empat) tahun yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada **Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten tahun 2023 - 2026** dan bersifat indikatif.

1.2 RUANG LINGKUP

Melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana Pembangunan Daerah sebagai suatu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta atas-bawah dan bawah-atas. Guna melaksanakan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Banten dalam membuat perencanaan pembangunan mengeluarkan 6 (enam) jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana

Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Dari segi waktu dokumen tersebut dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun) terdiri dari RPJPD dan RTRWP, perencanaan jangka menengah (5 tahun) terdiri dari RPJMD dan Renstra-PD, serta jangka pendek (1 tahun) terdiri dari RKPD dan Renja-PD.

Penyusunan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 berpedoman pada RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan rancangan arah kebijakan dan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam dokumen rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024. Penyusunan Rancangan Pembangunan Daerah selanjutnya menyusun Renstra Tahun 2023-2026 dimana akan dijabarkan dalam RKPD dan menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun Renstra PD, Renja PD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD. Dokumen RKPD dan RKA-PD inilah yang selanjutnya disusun menjadi Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya. Dokumen Penyusunan Rancangan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 juga akan menjadi acuan dalam penyusunan RPD Kabupaten/Kota dan berfungsi dalam pengendalian untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama periode tahun 2023-2026. Hubungan antar dokumen perencanaan dijelaskan lebih lanjut sebagaimana Gambar berikut:

Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

1.3 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan rancangan Rencana Strategi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor : 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026, disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah;

5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48444);
9. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2009 Nomor 130, Tambagan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan; Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999; Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999; Tentang Pelaksanaan Sistem Amdministrasi Manunggal Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda coba Kendaraan Bermotor, Bea balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaann Lalu Lintas Jalan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2008 Nomor 48, Tambagan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Mendagri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022;
22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 tahun 2018 tentang Retribusi Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016);
25. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
26. Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;
27. Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 19

Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;

28. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;
29. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2021 Tahun Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
30. Peraturan Gubernur Banten Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Daerah.
31. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
32. Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
33. Peraturan Gubernur Banten Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
34. Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Daerah;
35. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Daerah;
36. Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Strategi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten tahun 2023 - 2026 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten secara berkesinambungan.

B. Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut;

1. Menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan program kebijakan Badan Pendapatan Daerah jangka menengah;
2. Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten selama periode tahun 2023 - 2026 di sesuaikan dengan Peraturan Gubernur Banten Tentang Uraian Tugas dan Fungsi;
3. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dan Perencanaan penganggaran;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah se-Provinsi Banten.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Strategi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I	**:**	**PENDAHULUAN**
		Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026;
BAB II	**:**	**GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BANTEN**
		Menggambarkan tugas pokok dan fungsi struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;
BAB III	**:**	**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU BADAN PENDAPATAN DAERAH**
		Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan Renstras K/L dan Renstra Provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan penentuan isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;
BAB IV	**:**	**TUJUAN DAN SASARAN** Memuat dan menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;
BAB V	**:**	**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN** Memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;
BAB VI	:	**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
		Memuat rencana program dan kegiatan dan pendanaan indikatif;
BAB VII	**:**	**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
		Memuat indikator kinerja yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Banten;
BAB VIII	**:**	**PENUTUP**

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Kedudukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dalam struktur Pemerintahan Provinsi Banten adalah sebagai Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Badan Daerah (di dalam Pasal 129 huruf B) , BAPENDA Provinsi Banten dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah. Badan Pendapatan Daerah mengemban tugas untuk membantu Gubernur melaksanakan Kewenangan Desentralisasi, Dekonsentrasi, Dan Tugas Pembantuan di Bidang Pendapatan Daerah , dengan Tugas dan Fungsi utama sebagai :

- **TUGAS POKOK:**

  Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah.

- **FUNGSI BAPENDA secara umum**:

  1. Menyusun Rencana Strategis Badan be rdasarkan Rencana Strategis Pemerintahan Daerah;
  2. Memimpin, membina, dan mengkoordinasikan penyelengaraan kegiatan Badan;
  3. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan Badan dengan instansi terkait;
  4. Bertanggung Jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
  5. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Badan;
  6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Dinas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

- **FUNGSI BAPENDA secara khusus:**

  1. Pengelolaan Pendapatan Daerah;

2. Menggali Potensi Pendapatan Daerah;
3. Pelayan Masyarakat dalam Penerimaan Pajak Daerah.

❖ **SUSUNAN ORGANISASI BAPENDA terdiri dari:**

a. Kepala Badan;
b. Sekretaris;
c. Bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
d. Bidang pengendalian, sistem informasi dan evaluasi pendapatan daerah;
e. Bidang pengelolaan pendapatan daerah;
f. Unit pelaksana teknis (upt) badan;
g. Kelompok jabatan fungsional.

Berikut ini diuraikan tugas dan fungsi unit kerja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Banten sesuai dengan Lampiran I Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Banten:

A. BADAN PENDAPATAN DAERAH

1. Kepala Badan

a. Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
   1) Merumuskan rencana strategis dan rencana kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
   2) Menetapkan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah;
   3) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
   4) Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku;

5) Merumuskan penyelenggaraan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
6) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
7) Menyelenggarakan pengawasan teknis penatausahaan dan system aplikasi pendapatan daerah dan melaporkan hasil pengawasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
8) Menyelenggarakan fasilitasi dan kerjasama dengan instansi, unit kerja, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan badan;
9) Menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur mengenai pendapatan dan pelayanan umum sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah;
10) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan Badan Pendapan Daerah;
11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
12) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan Badan Pendapatan Daerah; dan
13) melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Sekretaris

a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
    1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Sekretariat berdasarkan Rencana Strategis Badan;
    2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat;
    3) Member petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
    4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
    5) Merencanakan rumusan kebijakan perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan program/kegiatan, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan;
    6) Menyelenggarakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
    7) Menyelenggarakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
    8) Menyelenggarakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
    9) Menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
    10) Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
    11) Menyelenggarakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

12) Menyelengarakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
13) Menyelenggarakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
14) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan dilingkungan Badan;
15) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administrative kegiatan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Perangkat Daerah;
16) Mengoordinasikan pengawasan teknis penatausahaan dan system aplikasi pendapatan daerah dan melaporkan hasil pengawasan kepada Kepala Badan.
17) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
18) Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
19) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, penyelengaraankearsipan, pengelolaan barang dan aset, kerumah tanggaan, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian Badan Pendapatan Daerah.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) merencanakan sub kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3) membagi tugas kepada bawahan;
4) membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
5) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
6) melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah;
7) melaksanakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
8) melaksanakan Administrasi Umum, Tata usaha dan Kehumasan Perangkat Daerah;
9) melaksanakan Penatausahaan Arsip Dinamis pada Perangkat Daerah;
10) melaksanakan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah;
11) melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
12) melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang;
13) melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
14) menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
15) Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan kerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
16) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. **Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah**

a. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud dalam huruf a, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Badan;
2) mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Bidang;
3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang;
5) merencanakan rumusan kebijakan perencanaan, pengembangan, regulasi dan kerjasama pendapatan daerah;
6) menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan, pengembangan, regulasi dan kerjasama pendapatan daerah;
7) menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pengembangan, regulasi dan kerjasama pendapatan daerah;
8) menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan dilingkungan bidang; dan

9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah

a. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dalam penyusunan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan sub kegiatan pada Sub Bidang;
2) Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Sub Bidang;
3) Membagi tugas kepada bawahan;
4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang;
5) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang;
6) Melaksanakan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah;
7) Menyusun rencana target pendapatan daerah;
8) Menyusun dan Menghimpun data secara periodik objek dan subjek pungutan serta perkembangannya;
9) Menyiapkan bahan dasar pengenaan pajak daerah;
10) Merencanakan Inovasi untuk meningkatkan Pendapatan Daerah;

11) Menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan pendapatan daerah;
12) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penetapan target pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
13) Melaporkan hasil perumusan kebijakan teknis perencanaan pendapatan pajak daerah;
14) Melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang;
15) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang ; dan
16) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. **Kepala Sub Bidang Pengembangan, Regulasi dan kerjasama Pendapatan Daerah**

a. Kepala Sub Bidang Pengembangan, Regulasi dan kerjasama Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dalam penyusunan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Sub Pengembangan, Regulasi dan kerjasama Pendapatan Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan sub kegiatan pada Sub Bidang;
2) Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Sub Bidang;
3) Membagi tugas kepada bawahan;
4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang;

5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang;
6) Melaksanakan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; dan
7) Melaksanakan Elektronifikasi Transaksi pemerintah daerah;
8) Mengembangkan Inovasi untuk meningkatkan Pendapatan Daerah;
9) Menyiapkan analisa dan pengembangan pajak daerah serta menyiapkan bahan penyusunan NJKB dan NJAB;
10) Menyusun rancangan regulasi untuk perencanaan dan pengembangan pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Lainnya;
11) Menyiapkan data penetapan dan perubahan tarif pungutan pajak daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya;
12) Menyusun rancangan perjanjian kerjasama pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Lainnya;
13) Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, instansi vertikal, unit kerja, swasta dan lembaga terkait lainnya dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
14) Menyusun regulasi dan perjanjian kerjasama pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan Lainnya;
15) Menyusun standar operasional prosedur teknis pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan Lainnya;

16) Menyusun kebijakan teknis pengembangan pengelolaan pajak daerah;
17) Menyusun Peta Jalan dan rencana aksi Elektronifikasi Transaksi pemerintah daerah;
18) Melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang;
19) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang; dan
20) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. **Kepala Bidang Pengendalian, Sistem Informasi Dan Evaluasi Pendapatan Daerah**

a. Kepala Bidang Pengendalian, Sistem Informasi Dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Bidang Pengendalian, Sistem Informasi Dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut::

1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Badan;
2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Bidang;
3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang;

5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;
6) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
7) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
8) Melaksanakan pengawasan teknis penatausahaan dan system aplikasi pendapatan daerah dan melaporkan hasil pengawasan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan;
9) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
10) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan badan Merumuskan kebijakan teknis pengendalian, pengawasan dan evaluasi pendapatan daerah;
11) Mengendalikan, supervisi dan evaluasi operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
12) Megevaluasi Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah;
13) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan pendapatan daerah;
14) Mengendalikan penyelesaian keberatan pajak daerah;
15) Mengoordinasikan pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan daerah dengan pihak terkait;
16) Mengoordinasikan pemeriksanaan pajak daerah;

17) Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
18) Mengoordinasikan pengelolaan system informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
19) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
20) Menyelenggarakan system informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal;
21) Merumuskan Laporan realisasi pendapatan daerah;
22) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan dilingkungan bidang; dan
23) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi

a. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian, Sistem Informasi Dan Evaluasi Pendapatan Daerah dalam penyusunan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
    1) Merencanakan sub kegiatan pada Sub Bidang;
    2) Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Sub Bidang;

3) Membagi tugas kepada bawahan;
4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang;
5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang;
6) Melaksanakan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;
7) Melaksanakan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah.
8) Menyiapkan data/bahan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;
9) Mengumpulkan bahan data pengajuan keberatan pajak daerah dari wajib pajak daerah;
10) Melakukan penegakan integritas dan nilai etika terhadap pemungutan pelayanan pajak daerah;
11) Melakukan Koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh APIP dan Eksternal;
12) Melaksanakan Pengawasan pelaksanaan kebijakan peraturan perundang-undangan terhadap UPTD PPD dan Perangkat Daerah penghasil;
13) Melaksanakan kegiatan supervise pemungutan dan pelayanan pajak daerah;
14) Membuat Laporan hasil Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;
15) Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat;
16) Melakukan penyelesaian permasalahan atas keberatan dan restitusi pajak daerah;
17) Melakukan evaluasi penyelesaian sengketa pajak;
18) Mengoordinasikan Penyelesaian atas keberatan dan restitusi pajak daerah;

19) Melakukan penyelesaian permasalahan atas keberatan dan restitusi pajak daerah;
20) Melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang;
21) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; dan
22) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

9. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi

a. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi mempunyai tugaspokok membantu Kepala Bidang Pengendalian, Sistem Informasi Dan Evaluasi Pendapatan Daerah dalam penyusunan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
    1) Merencanakan sub kegiatan pada Sub Bidang;
    2) Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Sub Bidang;
    3) Membagi tugas kepada bawahan;
    4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang;
    5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang;
    6) Melaksanakan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah:
    7) Mengelola data dan informasi perpajakan;
    8) Melaksanakan penyajian informasi pendapatan daerah sebagai bahan kebijakan;

9) Mengelola sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
10) Mengelola infrastruktur jaringan sistem informasi pelayanan pajak dan retribusi daerah;
11) Menyiapkan bahan kebijakan tentang system informasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
12) Menyiapkan bahan Pengembangan kebijakan system informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
13) Menyediakan Bahan Survey Kepuasan Masyarakat;
14) Melaksanakan Pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
15) Menyiapkan data laporan Sistem Informasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya;
16) Melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang;
17) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; dan
18) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

a. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantuKepala Badan Pendapatan Daerah dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai rincian tugas sebagai

berikut:

1) menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Badan;
2) mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Bidang;
3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan di lingkungan Bidang;
5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
6) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah;
7) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah;
8) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
9) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
10) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
11) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12) Mengoordinasikan pelaksanaan Pendaftaran, Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah,

Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya;

13) Mengoordinasikan pelaksanaan Pendaftaran, Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya;
14) Menyusun target pajak dan Retribusi daerah serta Pendapatan Lainnya;
15) Merumuskan hasil Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah;
16) Merumuskan bahan penyuluhan dan informasi pajak dan retribusi daerah;
17) Mengoordinasikan Pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak dan Retribusi daerah;
18) Mengoordinasikan Pelayanan pajak dan Retribusi daerah;
19) Mengoordinasikan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak, Retribusi Daerah dan pendapatan lainnya;
20) Merumuskan bahan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatanlainnya;
21) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi sub kegiatan Pendaftaran, Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah serta Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya; 2
22) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
23) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
24) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; dan

25) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. **Kepala Sub Bidang Pendaftaran, Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah**

a. Kepala Sub Bidang Pendaftaran, Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam penyusunan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Sub Bidang Pendaftaran, Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) merencanakan sub kegiatan pada Sub Bidang;
2) mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Sub Bidang;
3) membagitugas kepada bawahan;
4) membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang;
5) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang;
6) melaksanakan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
7) melaksanakan dan mengevaluasi Penetapan Wajib Pajak Daerah;
8) melaksanakan dan mengevaluasi Penagihan Pajak Daerah;
9) Menyiapkan bahan pelaksanaan Pendaftaran, Penetapan dan Penagihan pajak daerah;
10) Menyiapkan petunjuk teknis pendaftaran, penetapan dan penagihan pajak daerah;
11) Melakukan Pendataan Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah;

12) Menyiapkan bahan Pendaftaran dan Penagihan objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (PBBKB dan Pajak Rokok) dan Bahan Koordinasi Pendataan dan Pendaftaran Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (PKB, BBNKB dan Pajak Air Permukaan);
13) Mengumpulkan data atau bahan Penetapan Wajib Pajak Daerah (PBBKB dan Pajak Air Permukaan);
14) Menyiapkan, mengelompokkan dan memverifikasi data/bahan penagihan pajak daerah;
15) Mengoordinasikan Tunggakan Pajak Daerah;
16) Melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang;
17) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; dan
18) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. **Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya**
    a. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam penyusunan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan.
    b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
        1) Merencanakan sub kegiatan pada Sub Bidang;
        2) Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Sub Bidang;

3) Membagi tugas kepada bawahan;
4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang;
5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang;
6) Melaksanakan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
7) Melaksanakan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
8) Melaksanakan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
9) Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10) Menyiapkan bahan pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
11) Menyiapkan data/bahan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah;
12) Mengolah data surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) dari wajib pungut atau wajib pajak daerah;
13) Melakukan Penelitian dan Verifikasi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
14) Menyiapkan bahan Pembinaan dan Pengawasan Retribusi Daerah;
15) Melaporkan rekonsiliasi pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
16) Melaporkan pelaksanaan pemungutan pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
17) Menyusun bahan penyuluhan dan informasi pajak daerah; 18) Melaksanakan penyuluhan pajak daerah;
18) Melakukan penyebarluasan informasi pajak daerah;
19) Melaksanakan Pelayanan dan konsultasi pajak daerah;

20) Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Unit kerjaterkait;
21) Melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang;
22) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; dan
23) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

❖ **STRUKTUR ORGANISASI**

- Struktur organisasi badan pendapatan daerah (bapenda) provinsi banten terdiri dari kepala badan, sekretaris, Kepala bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, Kepala bidang pengendalian,sistem informasi dan evaluasi pendapatan daerah, kepala bidang pengelolaan pendapatan daerah, serta unit pelaksana teknis (upt), dan kelompok jabatan fungsional.

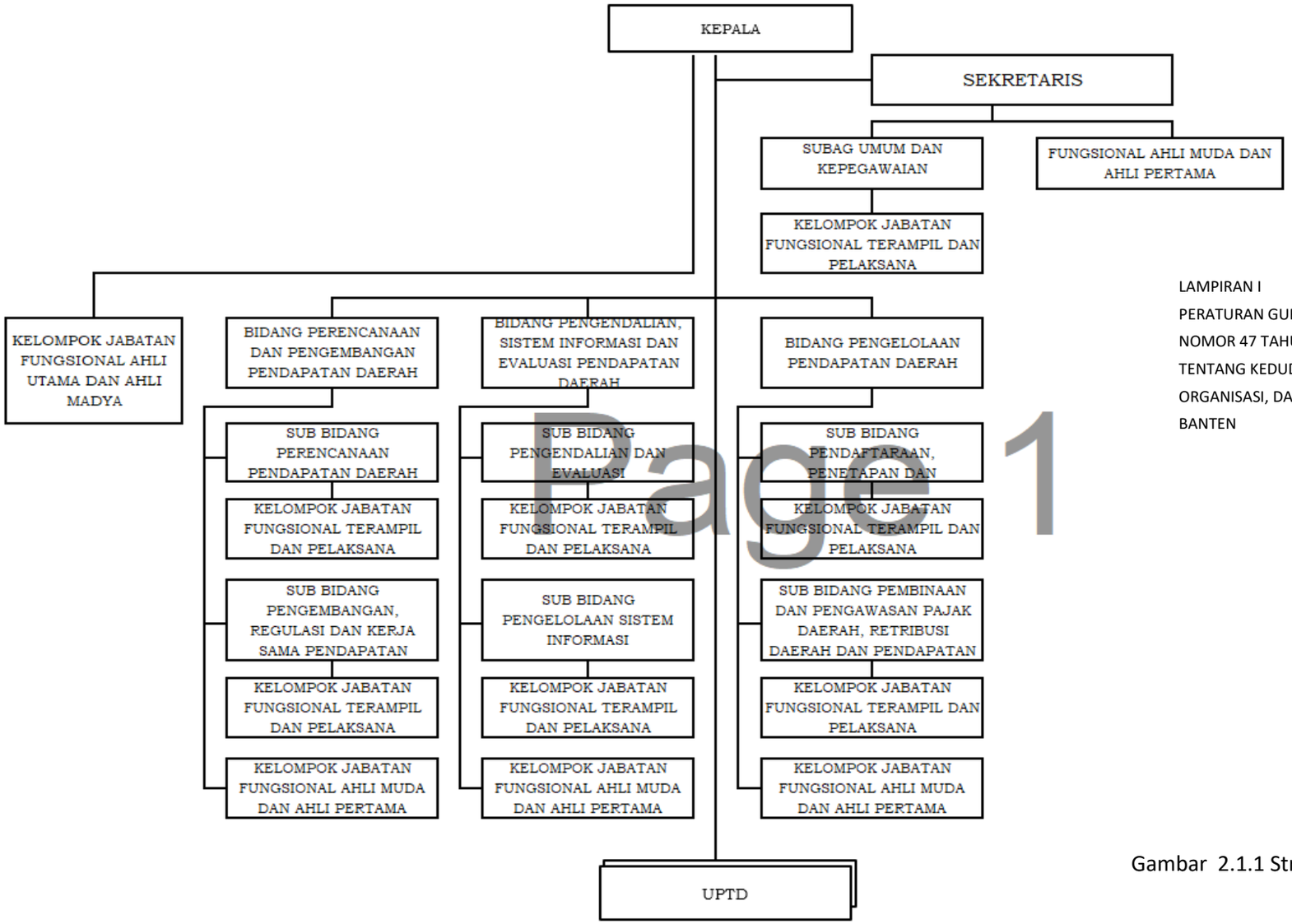

Page 1

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 47 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, TIPE, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN

Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi No 47 TH 2022

❖ KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PENDAPATAN (UPTD PPD) BAPENDA

Untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah (UPTD PPD BAPENDA) Badan Pendapatan Daerah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 55 tahun 2021 tentang perubahan kedua cabang atas peraturan Pada BAPENDA terdapat 12 (dua belas) kantor UPTD PPD BAPENDA Provinsi Banten .

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah (UPTD PPD BAPENDA) adalah unit pelaksana tugas teknis operasional Badan Pendapatan Daerah di lapangan. Dengan adanya perubahan Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Banten pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, dan pada Tahun 2017 perubahan SOTK/OPD sesuai Peraturan Gubernur Banten Nomor 86 tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) menjadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, maka Struktur Organisasi UPTD yang semulanya Kepala UPT dibantu oleh Kasubag Tata Usaha dan 2 Seksi yaitu, Kasi PKB & BBNKB dan Kasi Pajak Lain-lain, mengalami perubahan menjadi Kasubag Tata Usaha, Kasi Pendapatan dan Penetapan dan Kasi Penerimaan dan Penagihan.

Pada tahun 2008 Unit Pelaksanaan Teknis Dinas UPTD yang ada di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Berjumlah 6 UPTD yang terdiri atas :

a. Unit Pelaksanaan Teknis (UPTD) pada Kabupaten Lebak;
b. Unit Pelaksanaan Teknis (UPTD) Pada Kabupaten Pandeglang;
c. Unit Pelaksanaan Teknis (UPTD) pada Kabupaten Serang;
d. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) pada Kabupaten Tanggerang;
e. Unit Pelaksanaan Teknis (UPTD) pada Kota Tanggerang.

Dimana tiap-tiap UPTD di pimpin seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala UPTD dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pendaftaran dan Pendataan, Seksi Perhitungan dan Penetapan, Seksi Penerimaan dan Penagihan.

Pada Tahun 2009 Unit Pelaksana Teknis (UPTD) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten yang semula hanya ada di 6 UPTD/Samsat diKab/Kota

se-Provinsi Banten pada tahun 2009 ada penambahan 4 UPTD/Samsat yaitu Kantor UPTD/Bersama Samsat di Ciputat, Ciledug, Balaraja dan Cikande, karena pada Keputusan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2002 dimungkinkan bahwa unit Pelaksanaan Teknis (UPTD) dapat dibentuk, apabila ada pemekaran wilayah administrasi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten atau Apabila terjadi peningkatan potensi pendapatan daerah maupun adanya potensi wilayah pelayanan yang luas dapat dibentuk UPT atau Pembantu UPTD pada daerah Kabupaten/Kota untuk lebih mendekatkan fungsi pelayanan serta intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, Adapun Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten pada Tahun 2021 terdiri atas sesuai Peraturan Gubernur Banten Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten :

1. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Cikokol Kota Tangerang;
2. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Serpong Kota Tangerang Selatan;
3. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Ciputat Kota Tangerang Selatan;
4. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Ciledug Kota Tangerang;
5. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Rangkasbitung Kabupaten Lebak;
6. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pandeglang Kabupaten Pandeglang;
7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Balaraja Kabupaten Tangerang;
8. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Cikande Kabupaten Serang;
9. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Serang Kota Serang;
10. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Cilegon Kota Cilegon;
11. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Malingping Kabupaten Lebak.
12. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Kelapa Dua Kabupaten Tangerang.

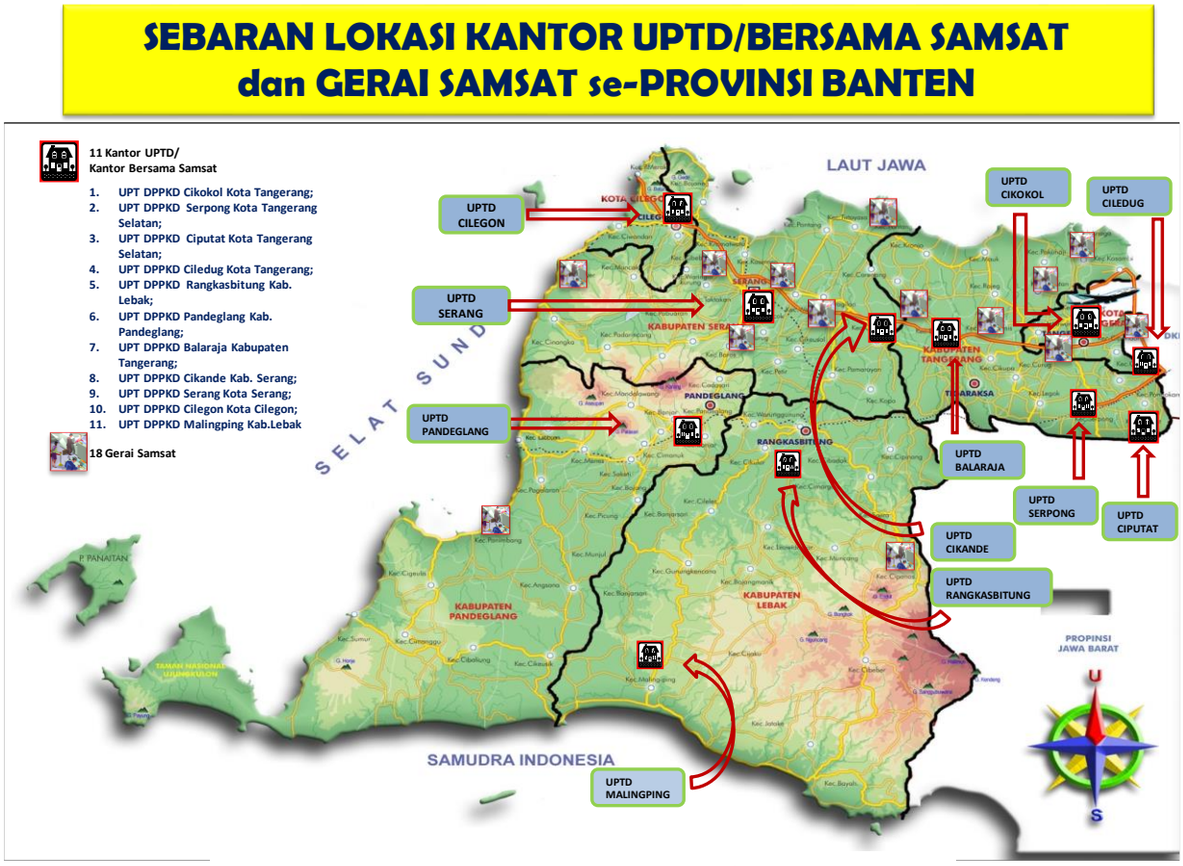

Gambar 2.1.2 peta sebaran UPTD PPD/gerai samsat

Sumber data : bidang pendapatan

<u>Kedudukan, Tugas dan Fungsi UPTD PPD BAPENDA adalah sebagai berikut :</u>

1. Kedudukan Unit Pelaksana Teknis (UPTD)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan Pajak Provinsi;
b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan Pajak Provinsi;
c. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, penerimaan dan penyetoran pajak provinsi; DRAF AWAL
d. pelaksanaan pendataan, penagihan dan intensifikasi pajak provinsi;
e. pelaksanaan penatausahaan keuangan, pembukuan dan pelaporan lingkup UPTD; dan
f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan barang milik daerah lingkup UPTD

Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PPD

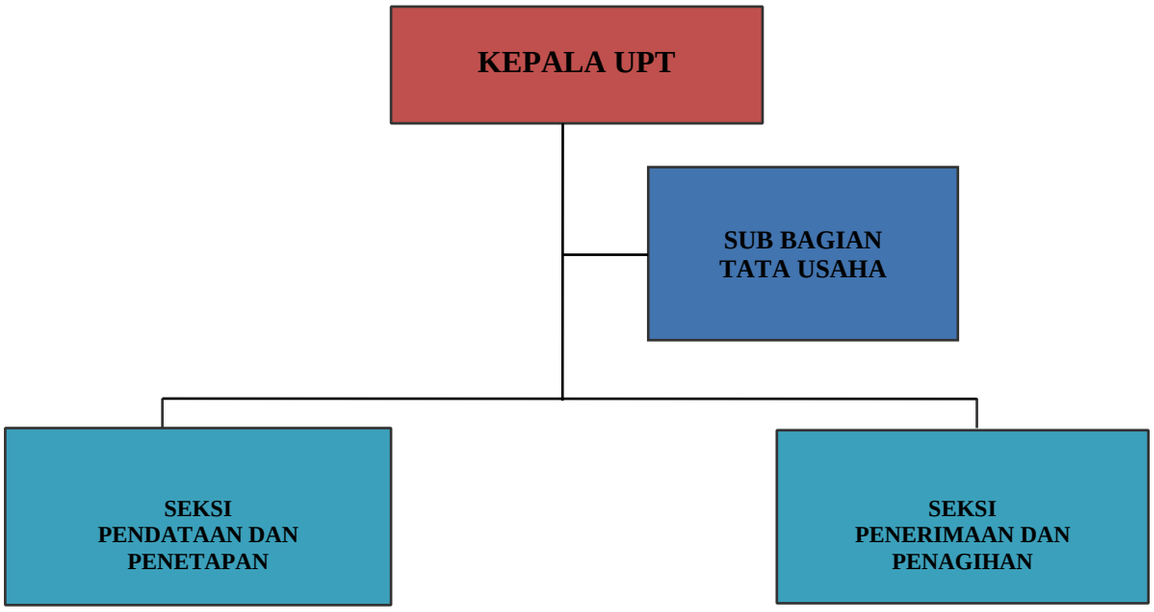

Gambar 2.1.3 struktur oragnisasi UPTD PPD

Sumber data : Subag Umum dan Kepegawaian

2.2 SUMBER DAYA MANUSIA BAPENDA PROVINSI BANTEN

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) Provinsi Banten dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mencakup:

1. Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan tahun 2021, BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) Provinsi Banten memiliki sumber daya aparatur sebanyak 1.085 orang yang tersebar di BAPENDA Induk sebanyak 181 orang dan di 12 Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten sebanyak 904 orang. Berdasarkan jumlah tersebut dapat dilihat bahwa 353 orang atau 34.70% berstatus PNS, sisanya 591 orang atau 65.30% berstatus Non PNS yang terdiri dari TKS/TPP (Tenaga Pemungut Pajak) sebanyak 740 orang, tenaga Satpam 119 Orang, tenaga Supir 255 orang, tenaga Pramubakti 126 orang, dan tenaga Arsip 8 Orang. Sumber daya aparatur yang dimiliki tersebut dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.1

Kondisi Sumberdaya Manusia Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun 2022

NO	UNIT KERJA	PNS			PEGAWAI TIDAK TETAP							
		PNS	CPNS	JUMLAH (3+4)	PENATA ADMINISTRASI	TPP	SATPAM	PRAMUBAKTI	PENGEMUDI	ARSIP	JUMLAH (6+7+8+9+10+11)	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	BAPENDA INDUK	79	6	85	66	-	10	8	5	7	96	181
2	UPTD SERANG	27	-	27	-	35	11	6	1	-	53	80
3	UPTD CIKANDE	30	-	30	-	38	8	6	1	-	53	83
4	UPTD SERPONG	19	-	19	-	29	8	5	2	-	44	63
5	UPTD CIPUTAT	16	-	16	-	31	9	15	1	-	64	72
6	UPTD BALARAJA	24	-	24	-	39	12	12	1	-	64	88
7	UPTD CIKOKOL	18	-	18	-	38	8	14	1	-	61	79
8	UPTD CILEDUG	17	-	17	-	37	8	11	3	-	59	76
9	UPTD CILEGON	25	-	25	-	46	7	3	2	-	58	83
10	UPTD PANDEGLANG	29	-	29	-	35	8	5	1	-	49	78
11	UPTD RANGKASBITUNG	22	-	22	-	24	10	14	2	-	50	72
12	UPTD MALINGPING	21	-	21	-	15	11	16	2	1	44	66
13	UPTD KELAPA DUA	20	-	20	-	21	9	11	3	-	44	64
JUMLAH		347	6	353	73	388	119	126	25	8	739	1085

Sumber data : Subag Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.2.2
Data Pegawai Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan
BAPENDA Provinsi Banten
Tahun 2022

No	Berdasarkan Golongan		Berdasarkan Tingkat Pendidikan	
1	IV	35 Orang	S3	-
2	III	274 Orang	S2	107 Orang
3	II	45 Orang	S1	174 Orang
4			D4	1 Orang
5			D3	25 Orang
6			D1	-
7			SMA	37 Orang
JUMLAH		354 Orang	JUMLAH	344 Orang

2. ASET/MODAL

Sampai dengan tahun 2017 jumlah aset yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Banten antara lain:

a. Tanah dan gedung bangunan ex. **Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten**beserta sebagian kelengkapan dan peralatan kantor lainnya ex. **Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten** yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPENDA Induk, dan yang tersebar di 11 UPT Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Banten. Namun dari 12 UPTD tersebut, 1 UPT PPD masih gedung sewa dan pinjam pakai

Tabel 2.2.3
DATA ASET SARANA PRASARANA
BAPENDA Provinsi Banten
Tahun 2022

No.	Golongan / Jenis / Nama Barang	Yang dimiliki saat ini		
		Kuantitas / Jumlah (Unit)	Kondisi	Kelayakan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Tanah dan Bangunan Gedung	24	Baik	Layak
2	Kendaraan Roda Empat	57	Baik	Layak
3	Kendaraan Roda Enam	31	Baik	Layak
4	Kendaraan Roda Dua	47	Baik	Layak
5	Meja Kerja	1200	Baik	Layak
6	Kursi Putar	200	Baik	Layak
7	Kursi Kerja	1500	Baik	Layak
8	Personal Komputer	300	Baik	Layak
9	Laptop	150	Baik	Layak
10	Televisi	20	Baik	Layak
11	Scanner	80	Baik	Layak
12	Printer	450	Baik	Layak
13	Lemari Besi	300	Baik	Layak
14	Sofa	15	Baik	Layak
15	AC Split	344	Baik	Layak
16	Ac Standing	45	Baik	Layak
Sumber ATISISBADA Provinsi Banten Tahun 2021				

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Pendapatan Daerah, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Deskripsi pelayanan tersebut, diagendakan akan dilaksanakan dalam rangka pemenuhan indikator kinerja daerah yang meliputi aspek, fokus dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas fungsinya yaitu Badan Pendapatan Daerah.

Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Provinsi Banten berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Outcome adalah sebagai berikut;

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

a. Kemandirian Keuangan Daerah

0. Indikator Kinerja Program (Outcome)

a. Persentase Peningkatan Pajak Daerah

b. Presentase Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain (%)

1. Unit Pelayanan Teknis (UPTD PPD) BAPENDA

Sampai dengan tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten telah memiliki 12 Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Daerah Provinsi Banten tersebar di 8 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten, 43 Gerai Samsat dan 2 Gerai Samsat Online yang dapat melayani wajib pajak diwilayah Provinsi DKI, Jawa Barat dan Banten,7 Bus Pelayanan Samsat Keliling, 12 Mobil minibus Samsat Keliling, 24 Samsat Motor, Adapun Gerai Samsat yang telah dibuka dan sudah beroperasi terdiri dari :

Tabel 2.3.1
Lokasi Sebaran Pelayanan Gerai SAMSAT BAPENDA Provinsi Banten

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Gerai
Wilayah Hukum Polda Banten		**136**	**28**
1	UPT Serang (Kota Serang)	6	3
2	UPT Cikande (Kab. Serang)	29	9
3	UPT Cilegon (Kota Cilegon)	8	2
4	UPT Rangkasbitung (Kab. Lebak)	19	4
5	UPT Pandeglang (Kab. Pandeglang)	35	3
6	UPT Malingping (Kab. Lebak)	10	4
7	UPT Balaraja (Kab. Tangerang)	29	3
Wilayah Hukum Polda Metro		**30**	**20**
8	UPT Cikokol (Kota Tangerang)	8	7
9	UPT Ciledug (Kota Tangerang)	5	4
10	UPT Ciputat (Kota Tangsel)	4	2
11	UPT Serpong (Kota Tangsel)	3	2
12	UPT Kelapa Dua (Kab.Tangerang)	10	5
Jumlah		**166**	**48**

Sumber data : PPID Bapenda Provinsi Banten

2.4 DATA STATISTIK SEKTORAL TAHUN 2018-2021

Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten kepada Masyarakat sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2018-2022 adalah mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik *(good governance)* pemerintah telah mencanangkan program Reformasi Birokrasi melalui Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010, dengan tujuan yaitu **"untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteritik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etika aparatur negara"**, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten termasuk salah satu di dalam Gambaran Umum Reformasi Birokrasi, yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, hal-hal yang menunjang sebagai berikut:

1. Organisasi dan Tata Kerja :
    - Penataan Organisasi dan Uraian Tugas
    - Perumusan Tata Kerja dan Mekanisme Kerja
2. Standar Pelayanan Kepuasan Masyarakat:
    - Standar Manajemen Mutu ISO 9001-2015
3. Budaya Pelayanan Prima:
    - Telah terdapat sistem *punishment(sanksi)/reward* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah Provinsi Banten
    - Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi;
        - Mall Pelayanan Publik (MPP) adalah upaya memberikan alternatif pelayanan yang terintegrasi, terpadu, mudah, cepat, terjangkau, aman dan terjamin untuk masyarakat, dislokasi UPTD PPD CIKOKOL (Gerai Mall TANGCITY) UPTD PPD PANDEGLANG
        - Pelayanan Samsat 3 Provinsi dilokasi UPTD PPD SERPONG.

- Terdapat Inovasi Pelayanan ;
    - E-Samsat, SAMOLNAS (Samsat On-Line Nasional)
    - E-Commerce Pelayanan berbasis elektronik (Tokopedia, Bukalapak, Alfamart, Indomaret)
    - Samsat Goes To Campus
    - Sistem Pelayanan Door To Door
    - Banten Automotive Exhibition (BAE)

4. Sumber Daya Aparatur
    - Melaksanakan Capacity Building di berbagai bidang pendapatan
    - Mengembangkan Sistem Karir (Carier Planning)
    - Menumbuhkan etos kerja, budaya kerja dan kebanggaan Esprit De Corp
    - Menerapkan Prinsip Reward and Punishment
    - Peningkatan kesejahteraan pegawai
5. Sarana dan Fasilitas Pelayanan
    - Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas perkantoran
    - Pemenuhan Fasilitas Pelayanan (lahan parkir, ruang pelayanan, ruang arsip, dll)
    - Pengembangan Kantor Bersama/Samsat Pembantu
    - Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah berbasis IT
    - Pelaksanaan Online Sistem Pajak dan Retribusi Daerah
6. Kinerja Pendapatan Masa Lalu
    - Kinerja Pendapatan daerah merupakan nilai realisasi/perhitungan dari pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi untuk periode tahun sebelumnya, Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2021 menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik. **Rata – rata pertumbuhan pendapatan daerah** berada pada kisaran 12,58 persen, pendapatan daerah pada tahun 2017 sebesar Rp 5,41 triliun terus bergerak naik hingga pada tahun 2021 menjadi Rp 8,65 triliun. Pertumbuhan tersebut memberikan gambaran yang sangat baik terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebesar 12,9 persen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2017 masih sebesar Rp 3,30 triliun dan menjadi Rp 5,46 triliun pada tahun 2021

TABEL 2.4.1

CAPAIAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2017-2021

NO	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	**Pendapatan Asli Daerah**	**5.756.371.374.247**	**6.329.138.234.646**	**7.022.309.916.624**	**5.906.535.160.351**	**7.006.034.274.371**
	1. Pajak Daerah	5.487.328.744.008	6.032.622.560.477	6.720.753.611.586	5.659.646.555.009	6.670.933.202.862
	2. Retribusi Daerah	19.407.050.416	13.549.776.374	20.853.155.055	8.728.428.613	10.965.757.646
	3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	49.918.700.416	51.638.634.268	53.933.548.147	54.590.414.077	56.896.567.111
	4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	199.716.879.407	231.327.263.527	226.769.601.836	183.569.762.652	267.238.746.751
2	**Dana Perimbangan**	**3.930.029.963.372**	**3.978.289.425.586**	**4.166.561.801.805**	**4.415.060.881.580**	**4.606.959.386.908**
	1. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	640.348.609.522	650.605.096.612	536.826.414.729	701.553.882.875	884.866.811.923
	2. Dana Alokasi Umum	1.059.320.237.000	1.072.903.468.000	1.140.003.353.000	1.042.968.771.000	1.070.448.323.000
	3. Dana Alokasi Khusus	2.230.361.116.850	2.254.780.860.974	2.489.732.034.076	2.630.599.149.705	2.606.678.366.985
	4. Dana Penyesuaian				39.939.078.000	44.965.885.000
3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**19.664.045.820**	**12.938.658.128**	**13.001.410.625**	**12.520.209.294**	**6.738.888.111**
	1. Pendapatan Hibah	17.881.934.921	6.616.233.740	12.086.246.182	11.718.911.506	5.523.000.000
	2. Pendapatan Lainnya	1.782.110.899	6.322.424.388	915.164.443	801.297.788	1.215.888.111
	Jumlah Pendapatan Daerah	**9.706.065.383.439**	**10.320.366.318.360**	**11.201.873.129.054**	**10.334.116.251.225**	**11.619.732.549.390**

Suber data : bidang pendapatan

Tabel 2.4.2

TREN CAPAIAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2017-2021

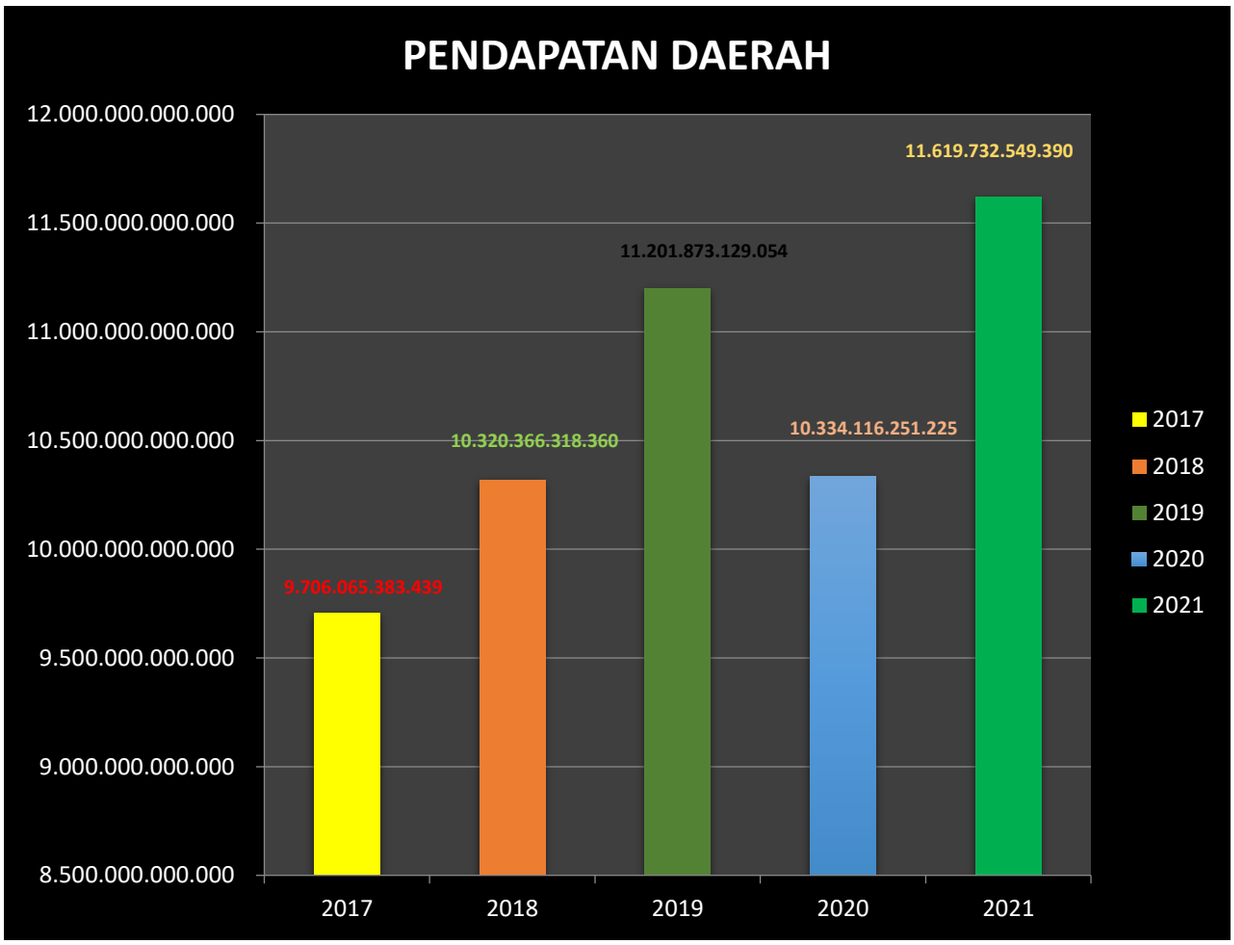

Suber data : bidang pendapatan

Table 2.4.3 DATA CAPAIAN

No	Indikator Sasaran/Program		Uraian	Data Baseline	PERHITUNGAN 2021 (UnAudited) Realisasi	CAPAIAN 2018 Target	2018 Realisasi	2018 %	2019 Target	2019 Realisasi	2019 %	2020 Target	2020 Realisasi	2020 %	2021 Target	2021 Realisasi	2021 %
1	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	-	Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)		7.005.803.920.722,00	59,30	61,68	104,02	60,62	65,06	107,32	61,91	57,16	92,32	63,19	60,29	95,42
		-	Pendapatan Daerah (Rupiah)		11.619.502.195.741,00												
2	Persentase Peningkatan Pajak Daerah (%)	-	Pajak Daerah (Rupiah)	5.487.328.744.008	6.670.707.124.213		9,94			11,41		8,00	(15,79)	(197,36)	8,00	17,86	223,30
3	Persentase Potensi Tunggakan Pajak Daerah yang dapat diselesaikan (%)	-	Tunggakan Pajak (Unit)	2.200.000	584.816	14,20	25,00	176,06	15,22	23,73	155,94	17,56	17,08	97,27	18,10	26,58	146,86
4	Persentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (%)	1	Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang (%)														
			- Pajak Daerah UPTD		222.456.204.004,00							9,72	(19,31)	(198,63)	10,23	16,45	160,83
		2	Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande (%)														
			- Pajak Daerah UPTD		309.529.833.572,00							9,94	(17,19)	(172,93)	10,12	19,11	188,80
		3	Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang (%)														
			- Pajak Daerah UPTD		135.168.208.000,00							9,75	(16,69)	(171,21)	10,22	10,68	104,54
		4	Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung (%)														
			- Pajak Daerah UPTD		114.159.744.306,00							9,72	(19,64)	(202,06)	10,23	13,39	130,91
		5	Persentase Peningkatan Pajak Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping (%)														
			- Pajak Daerah UPTD		42.041.762.206,00							9,86	(15,85)	(160,70)	10,16	7,75	76,26
		6	Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat (%)														
			- Pajak Daerah UPTD		778.560.522.700,00							9,67	(20,07)	(207,55)	10,26	16,83	164,00
		7	Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong (%)														
			- Pajak Daerah UPTD		565.442.316.012,00							9,76	(14,89)	(152,57)	10,21	14,59	142,89
		8	Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja (%)														
			- Pajak Daerah UPTD		585.815.563.986,00							9,74	(62,67)	(643,40)	10,23	14,82	144,87
		9	Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol (%)														
			- Pajak Daerah UPTD		733.933.152.125,00							9,73	(17,06)	(175,29)	10,23	12,81	125,22
		10	Persentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug (%)														
			- Pajak Daerah UPTD		565.854.115.172,00							9,71	(19,35)	(199,29)	10,24	18,60	181,63
		11	Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon (%)														
			- Pajak Daerah UPTD		213.651.838.300,00							9,71	(21,85)	(224,98)	10,24	16,67	162,78
5	Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain (%)	-	Retribusi Daerah dan PLL		341.835.684.619,00		#DIV/0!			1,65		2,95	(17,53)	(594,31)	2,96	31,77	1073,48
6	Persentase Peningkatan Potensi Pajak dan Bukan Pajak (%)	-	potensi pajak/bukan pajak	Jumlah Wajib Pajak (PKB, BBNKB, AP, PBBKB, Pajak Rokok) dan Wajib Retribusi	17.174.084							1,05	(2,56)	(244,14)	1,05	5,61	534,48
		-															
7	Jumlah Inovasi yang terimplementasikan (inovasi)	-	Realisasi pengembangan Aplikasi									2	5	250,00	3	7	233,33
		-															
8	Penurunan Gangguan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (kejadian)	-	Realisasi Gangguan Sistem									30	0	100,00	25	1	96,00
		-															
9	Persentase Penurunan Temuan SPI antar Tahun Anggaran (%)	-	seluruh tindak lanjut Laporan hasil temuan SPI		14							50	50	100,00	35	49	140,00
		-															
10	Capaian Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (%)	-	Realisasi Capaian Indeks Kepuasan Pelayanan									2,80	2,80	100,00	3,0	3,0	100,00
		-															
11	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)											100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)											100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)											100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)											100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	NILAI IKM	-	Realisasi Capaian IKM			2,80	2,80	100,00	3,00	3,00	100,00						
		-															
16	PERSENTASE PENINGKATAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN DAERAH (%)	-	Realisasi Pajak Daerah	Pajak Daerah		57,58	59,09	102,62	58,94	62,38	105,84						
		-		Pendapatan Daerah													
17	PERSENTASE PENINGKATAN RETRIBUSI DAERAH DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH (%)	-	Realisasi Retribusi Daerah dan PLL			42,42	41,62	98,12	41,06	41,46	100,98						
		-															

Sumber data : Bidang Perencanan dan pengembangan & PEP keuangan

BAB. III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten mengacu pada Strategi, Kebijakan serta Program dan Indikator yang berasal dari arah kebijakan yang diambil dari RPD, serta RPJP dengan memperhatikan dan mengacu dari RPJP Nasional. Untuk Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten meliputi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Kebijakan dan Program pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.

Berbagai langkah yang telah diupayakan selama periode 2017-2022, diantaranya memberikan pondasi-pondasi sebagai kekuatan yang menjadi modal dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten di masa mendatang. Disisi lain berbagai permasalahan yang belum terselesaikan sebagai permasalahan yang masih melekat pada keberadaan dan fungsi kelembagaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten yang perlu diantisipasi dalam mendukung keberhasilan atas apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Berdasarkan prospek dan faktor pengaruh tersebut, dengan memperhatikan isu-isu strategis maka dengan analisa SWOT dapat diidentifikasi peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan yang dapat berpengaruh pada pencapaian visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten. Pengaruh tersebut yang dikategorikan menjadi 2 (dua) faktor tersebut, faktor internal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu kekuatan (*strengthness*) maupun kelemahan (*weakness*) dalam organisasi. Unsur-unsur kekuatan yang dapat dijadikan sebagai peluang peningkatan kinerja kedudukan dan peran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten adalah :

1. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang mempunyai kewenangan penuh dalam pengelolaan pendapatan daerah;

2. Tersedianya dukungan pimpinan daerah yang sangat kuat dan sumber dana yang sangat memadai untuk menjalankan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;
3. Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se Banten merupakan kepanjangan tangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dalam menjalankan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;
4. Adanya komitmen dan semangat bersama antara pimpinan dan staf di lingkungan BAPENDA Provinsi Banten untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara baik dan inovatif;
5. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Merespon beberapa hal yang menjadi permasalahan diatas, Badan Pendapan Daerah selaku Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai posisi dan kedudukan sebagai badan penunjang keuangan daerah skaligus menjadi tugas dan fungsinya mengelola pendapaan daerah memiliki peran penting untuk berkontribusi memberikan solusi atas permasalahan. Dengan adanya peningkatan belanja yang harus dipenuhi, maka kenaikan target pendapatan menjadi hal yang tidak bisa dihindari, karena tingkat kebutuhan belanja berbanding lurus (linear) dengan target pendapatan.Oleh karenanya Badan pendapatan daerah harus terus bahu membahu mengerahkan segala upaya dan strategi agar pendapatan daerah yang telah ditargetkan dapat tercapai, hal ini juga selaras dengan visi misi badan pendapatan daerah provinsi banten yaitu “optimal pelayanan, maksimal pendapatan”.

Belum tersedianya rumusan baku untuk menentukan angka target pajak daerah yang dalam kontek pembahasan ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi persoalan tersendiri bagi Badan Pendapatan Daerah ketika mendapat tuntutan kenaikan target pendapatan apalagi dalam situasi pandemi seperti yang terjadi sekarang.

Dalam analisa pembahasan disini hanya dibatasi pada metode penghitungan terhadap capaian realisasi penerimaan Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dalam Tahun Anggaran berjalan, yaitu Tahun Anggaran 2021. Metode penghitungan yang diterapkan disini adalah metode

penghitungan berbasis data realisasi penerimaan dan data potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan penggunaan istilah metode analisis deskriptif *(Analisis Ratio)* dan Metode Analisis Trend. Tetapi sebelumnya sebagai gambaran terlebih dahulu dapat disampaikan trend data komposisi PKB dan BBNKB realisasi penerimaan tahun 2017 s/d tahun 2020, sebagai berikut:

A. PKB

1. Tabel Data Komposisi Realisasi Penerimaan PKB Pertahun

- Komposisi realisasi penerimaan PKB Tahun Anggaran 2017

No	Unsur PKB	Realisasi Penerimaan TA 2017		Kontribusi (%)
		Unit	PKB Pokok	
1	PKB KENDARAAN BARU	397.982	302.081.939.850	14,28%
2	PKB KENDARAAN DU	1.968.474	1.290.751.011.750	61,01%
3	PKB KENDARAAN TUNGGAKAN	426.565	352.158.131.800	16,65%
4	PKB MUTASI MASUK DALAM DAERAH	40.012	30.178.443.000	1,43%
5	PKB MUTASI MASUK LUAR PROV	56.419	88.148.597.800	4,17%
6	PKB MUTASI KELUAR	68.510	52.328.527.700	2,47%
	Grand Total	**2.957.962**	**2.115.646.651.900**	**100,00%**

Tabel 3.1.1: Komposisi Data Realisasi Penerimaan PKB Th.2017

- Komposisi realisasi penerimaan PKB Tahun Anggaran 2018

No	Unsur PKB	Realisasi Penerimaan TA 2018		Kontribusi (%)
		Unit	PKB Pokok	
1	PKB KENDARAAN BARU	428.713	334.040.510.800	14,06%
2	PKB KENDARAAN DU	2.091.932	1.466.524.005.050	61,74%
3	PKB KENDARAAN TUNGGAKAN	470.417	413.517.979.600	17,41%
4	PKB MUTASI MASUK DALAM DAERAH	38.484	29.600.084.325	1,25%
5	PKB MUTASI MASUK LUAR PROV	48.137	73.126.244.200	3,08%
6	PKB MUTASI KELUAR	62.329	58.379.315.950	2,46%
	Grand Total	**3.140.012**	**2.375.188.139.925**	**100,00%**

Tabel 3.1.2: Komposisi Data Realisasi Penerimaan PKB Th.2018

Komposisi realisasi penerimaan PKB Tahun Anggaran 2019

No	Unsur PKB	Realisasi Penerimaan TA 2019		Kontribusi (%)
		Unit	PKB Pokok	
1	PKB KENDARAAN BARU	412.987	341.161.564.300	11,95%
2	PKB KENDARAAN DU	2.248.488	1.875.251.918.050	65,67%
3	PKB KENDARAAN TUNGGAKAN	434.822	447.334.059.850	15,66%
4	PKB MUTASI MASUK DALAM DAERAH	40.099	36.134.869.500	1,27%
5	PKB MUTASI MASUK LUAR PROV	51.728	89.291.275.000	3,13%
6	PKB MUTASI KELUAR	60.891	66.527.101.650	2,33%
	Grand Total	**3.249.015**	**2.855.700.788.350**	**100,00%**

Tabel 3.1.3: Komposisi Data Realisasi Penerimaan PKB Th.2019

- Komposisi realisasi penerimaan PKB Tahun Anggaran 2020

NO	UNSUR PKB	Realisasi Penerimaan TA 2020		KONTRIBUSI (%)
		UNIT	Rp.	
1	PKB KENDARAAN BARU	240.026	212.975.379.200	7,81%
2	PKB KENDARAAN DU	2.148.751	1.916.809.031.850	70,30%
3	PKB KENDARAAN TUNGGAKAN	350.447	408.006.132.950	14,96%
4	PKB MUTASI MASUK DALAM DAERAH	35.026	36.197.483.700	1,33%
5	PKB MUTASI MASUK LUAR PROV	44.752	87.281.864.802	3,20%
6	PKB MUTASI KELUAR	56.626	65.299.299.372	2,39%
	Grand Total	**2.875.628**	**2.726.569.191.874**	**100,00 %**

Tabel 3.1. 4: Komposisi Data Realisasi Penerimaan PKB Th.2020

- Komposisi realisasi penerimaan PKB Tahun Anggaran 2021

NO	UNSUR PKB	Realisasi Penerimaan TA 2020		KONTRIBUSI (%)
		UNIT	Rp.	
1	PKB KENDARAAN BARU	301.222	284.829.946.000	9,64%
2	PKB KENDARAAN DU	2.144.304	2.175.184.632.250	73,63%
3	PKB KENDARAAN TUNGGAKAN	305.691	276.551.768.450	9,36%
4	PKB MUTASI MASUK DALAM DAERAH	33.706	38.002.818.200	1,29%
5	PKB MUTASI MASUK LUAR PROV	46.358	99.937.904.500	3,38%
6	PKB MUTASI KELUAR	56.470	79.558.569.800	2,69%
	Grand Total	**2.887.751**	**2.954.065.639.200**	**100,00%**

Tabel 3.1.5: Komposisi Data Realisasi Penerimaan PKB Th.2020

Kesimpulan dari data komposisi realisasi penerimaan PKB tahun 2017 s/d tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. PKB dari unsur Kendaraan Baru

   a) Kontribusi PKB yang berasal dari kendaraan baru terhadap total penerimaan PKB tahun 2017 ke tahun 2018, secara persentase naik 10,58%, atau sebesar Rp. 31.958.570.950,-, dari jumlah unit juga mengalami kenaikan/peningkatan sebanyak 30.731 unit;

b) Kontribusi PKB yang berasal dari kendaraan baru terhadap total penerimaan PKB tahun 2018 ke tahun 2019, secara persentase naik 2,13% atau sebesar Rp. 7.121.053.500,-, dari jumlah unit mengalami penurunan sebanyak 15.726 unit;

c) Kontribusi PKB yang berasal dari kendaraan baru terhadap total penerimaan PKB tahun 2019 ke tahun 2020, secara persentase turun **37,57%** atau sebesar Rp. **128.186.185.100,-,** dari jumlah unit juga mengalami penurunan sebanyak **172.961** unit.

d) Kontribusi PKB yang berasal dari kendaraan baru terhadap total penerimaan PKB tahun 2020 ke tahun 2021, secara persentase naik **33.74%** atau sebesar Rp. **71.854.566.800,-,** dari jumlah unit juga mengalami kenaikan sebanyak **61.196** unit, ini berarti di tahun 2021 kondisi pertumbuhan perekonomian masyarakat telah mulai membaik dari situasi pandemi jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 namun belum lebih baik dari kondisi pada tahun 2019.

2. PKB dari unsur kendaraan Daftar Ulang

a) Kontribusi PKB yang berasal dari kendaraan daftar ulang bukan tunggakan terhadap total penerimaan PKB tahun 2017 ke tahun 2018, secara persentase naik 13,62% atau sebesar Rp. 175.772.993.300,-, dari jumlah unit juga mengalami kenaikan/peningkatan sebanyak 123.458 unit;

b) Kontribusi PKB yang berasal dari kendaraan daftar ulang bukan tunggakan terhadap total penerimaan PKB tahun 2018 ke tahun 2019, secara persentase naik 27,87% atau sebesar Rp. 408.727.913.000,-, dari jumlah unit juga mengalami kenaikan/peningkatan sebanyak 156.556 unit;

c) Kontribusi PKB yang berasal dari kendaraan daftar ulang bukan tunggakan terhadap total penerimaan PKB tahun 2019 ke tahun 2020, secara persentase naik 2,22% atau sebesar **Rp. 41.557.113.800,-,** namundari jumlah unit mengalami penurunan sebanyak 99.737 unit.

d) Kontribusi PKB yang berasal dari kendaraan daftar ulang bukan tunggakan terhadap total penerimaan PKB tahun 2020 ke tahun 2021, secara persentase naik 13,48% atau sebesar **Rp.**

258.375.600.400,-, namundari jumlah unit mengalami penurunan sebanyak 4.447 unit, hal ini dapat diasumsikan jumlah kendaraan roda 4 (empat) atau lebih, jumlahnya lebih banyak dari tahun sebelumnya sedangkan kendaraan roda 2 (dua) jumlahnya lebih sedikit dari tahun sebelumnya karena nilai rupiah kendaraan roda 4 (empat) lebih besar dari pada nilai rupiah kendaraan roda 2 (dua).

3. PKB dari unsur kendaraan Tunggakan (Realisasi Tunggakan)

   a) Kontribusi PKB yang berasal dari kendaraan tunggakan terhadap total penerimaan PKB tahun 2017 ke tahun 2018, secara persentase naik 17,42% atau sebesar Rp. 61.359.847.800,- dari jumlah unit juga mengalami kenaikan/peningkatan sebanyak 43.852 unit;

   b) Kontribusi PKB yang berasal dari kendaraan tunggakan terhadap total penerimaan PKB tahun 2018 ke tahun 2019, secara persentase naik 8,18% atau sebesar Rp. 33.816.080.250,-, namun dari jumlah unit turun sebanyak 35.595 unit;

   c) Kontribusi PKB yang berasal dari kendaraan tunggakan terhadap total penerimaan PKB tahun 2019 ke tahun 2020, secara persentase turun 8,79% atau sebesar Rp. 39.327.926.900,-, dan dari jumlah unit juga turun sebanyak 84.375 unit.

   d) Kontribusi PKB yang berasal dari kendaraan tunggakan terhadap total penerimaan PKB tahun 2020 ke tahun 2021, secara persentase turun 32,22% atau sebesar Rp. 131.454.364.500,-, dan dari jumlah unit juga turun sebanyak 44.756 unit.

4. PKB dari unsur kendaraan Mutasi Masuk Dalam Daerah

   a) Kontribusi PKB yang berasal dari kendaraan mutasi masuk dari dalam daerah dan pendaftaran ulang ganti pemilik terhadap total penerimaan PKB tahun 2017 ke tahun 2018, secara persentase turun 1,92% atau sebesar Rp. 578.358.675,-, dan dari jumlah unit juga mengalami penurunan sebanyak 1.528 unit;

   b) Kontribusi PKB yang berasal dari kendaraan mutasi masuk dari dalam daerah dan pendaftaran ulang ganti pemilik terhadap total penerimaan PKB tahun 2018 ke tahun 2019, secara persentase naik 22,08% atau sebesar Rp. 6.534.785.175,-, dan dari jumlah unit juga mengalami kenaikan/peningkatan sebanyak 1.615 unit;

c) Kontribusi PKB yang berasal dari kendaraan mutasi masuk dari dalam daerah dan pendaftaran ulang ganti pemilik terhadap total penerimaan PKB tahun 2019 ke tahun 2020, secara persentase naik 0,17% atau sebesar Rp. 62.614.200,-, namun dari jumlah unit mengalami penurunan sebanyak 5.073 unit.

d) Kontribusi PKB yang berasal dari kendaraan mutasi masuk dari dalam daerah dan pendaftaran ulang ganti pemilik terhadap total penerimaan PKB tahun 2020 ke tahun 2021, secara persentase naik 4,99% atau sebesar Rp. 1,805,334,500,-, namun dari jumlah unit mengalami penurunan sebanyak 1.320 unit. Kondisi seperti ini juga dapat diasumsikan untuk proses pendaftaran mutasi masuk dalam daerah dan pendaftaran ulang ganti pemilik jumlah kendaraannya lebih banyak roda 4 (empat) dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya, sedangkan untuk roda 2 (dua) lebih sedikit dari tahun sebelumnya, karena nilai rupiah kendaraan roda 4 (empat) lebih besar dari pada nilai rupiah kendaraan roda 2 (dua).

5. PKB dari unsur kendaraan Mutasi Masuk dari Luar Daerah

a) Kontribusi PKB yang berasal dari kendaraan mutasi masuk dari luar daerah terhadap total penerimaan PKB tahun 2017 ke tahun 2018, secara persentase turun 17,64% atau sebesar Rp. 15.022.353.600,-, dari jumlah unit juga mengalami penurunan sebanyak 8.282 unit.

b) Kontribusi PKB yang berasal dari kendaraan mutasi masuk dari luar daerah terhadap total penerimaan PKB tahun 2018 ke tahun 2019, secara persentase naik 22,11% atau sebesar Rp. 16.165.030.800,-, dan dari jumlah unit juga mengalami kenaikan/peningkatan sebanyak 3.591 unit.

c) Kontribusi PKB yang berasal dari kendaraan mutasi masuk dari luar daerah terhadap total penerimaan PKB tahun 2019 ke tahun 2020, secara persentase turun 2,25% atau sebesar Rp. 2.009.410.198,-, dan dari jumlah unit juga mengalami penurunan sebanyak 6.976 unit.

d) Kontribusi PKB yang berasal dari kendaraan mutasi masuk dari luar daerah terhadap total penerimaan PKB tahun 2020 ke tahun 2021, secara persentase naik 14,50% atau sebesar Rp. 12.656.039.698,-, dan dari jumlah unit juga mengalami kenaikan sebanyak 1.606 unit. Kenaikan dari sisi jumlah unit kendaraan maupun jumlah nilai

rupiah akibat dorongan dari adanya program pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang berlangsung sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan akhir tahun 2021.

6. PKB dari unsur kendaraan Mutasi Keluar

   a) Kontribusi PKB yang berasal dari kendaraan mutasi keluar terhadap total penerimaan PKB tahun 2017 ke tahun 2018, secara persentase naik 15,56% atau sebesar Rp. 6.050.788.250,-, namun dari jumlah unit mengalami penurunan sebanyak 6.181 unit.

   b) Kontribusi PKB yang berasal dari kendaraan mutasi keluar terhadap total penerimaan PKB tahun 2018 ke tahun 2019, secara persentase naik 13,96% atau sebesar Rp. 8.147.785.700,-, dari jumlah unit mengalami penurunan sebanyak 1.438 unit.

   c) Kontribusi PKB yang berasal dari kendaraan mutasi keluar terhadap total penerimaan PKB tahun 2019 ke tahun 2020, secara persentase turun 1,85% atau sebesar Rp. 1.227.802.278,-, dan dari jumlah unit juga mengalami penurunan sebanyak 4.265 unit.

   d) Kontribusi PKB yang berasal dari kendaraan mutasi keluar terhadap total penerimaan PKB tahun 2020 ke tahun 2021, secara persentase naik 21,84% atau sebesar Rp. 14.259.270.428,-, namun dari jumlah unit mengalami penurunan sebanyak 156 unit, kondisi semacam ini dapat diasumsikan bahwa kendaraan yang melakukan proses mutasi keluar dari banten lebih banyak kendaraan roda 4 (empat) karena nilai rupiah kendaraan roda 4 (empat) lebih besar dari pada nilai rupiah kendaraan roda 2 (dua).

B. BBNKB

- Komposisi realisasi penerimaan BBNKB tahun 2017

No	UNSUR BBNKB	JUMLAH		KONTRIBUSI
		Unit	BBNKB POKOK	(%)
1	BBNKB KENDARAAN BARU	397,961	1.930.869.330.000	98,04%
2	BBNKB KENDARAAN DU	2.393.396	9.905.401.203	0,50%
3	BBNKB MUTASI MASUK DALAM PROVINSI	26,999	10.289.647.000	0,52%
4	BBNKB MUTASI MASUK LUAR PROVINSI	28,716	18.492.891.000	0,94%
	JUMLAH SELURUHNYA	**2.847.072**	**1.969.557.269.203**	**100,00%**

Tabel 3.1.5: Komposisi Data Realisasi Penerimaan BBNKB Th.2017

*Terlampir data komposisi realisasi penrimaan BBNKB TA 2017 perbulan

- Komposisi realisasi penerimaan BBNKB tahun 2018

No	UNSUR BBNKB	JUMLAH		KONTRIBUSI
		Unit	BBNKB POKOK	(%)
1	BBNKB KENDARAAN BARU	428,693	2.128.857.628.000	97,88%
2	BBNKB KENDARAAN DU	2.561.207	10.263.975.700	0,47%
3	BBNKB MUTASI MASUK DALAM PROVINSI	26,615	10.433.273.000	0,48%
4	BBNKB MUTASI MASUK LUAR PROVINSI	33,157	25.388.830.700	1,17%
	JUMLAH SELURUHNYA	**3.049.672**	**2.174.943.707.400**	**100,00%**

Tabel 3.1.6: Komposisi Data Realisasi Penerimaan BBNKB Th.2018

- Komposisi realisasi penerimaan BBNKB tahun 2019

No	UNSUR BBNKB	JUMLAH		KONTRIBUSI
		Unit	BBNKB POKOK	(%)
1	BBNKB KENDARAAN BARU	412,943	2.323.632.319.500	98,22%
2	BBNKB KENDARAAN DU	2.682.383	8.906.500.300	0,38%
3	BBNKB MUTASI MASUK DALAM PROVINSI	21,946	9.092.928.000	0,38%
4	BBNKB MUTASI MASUK LUAR PROVINSI	29,386	23.996.877.000	1,01%
	JUMLAH SELURUHNYA	**3.148.403**	**2.365.630.412.300**	**100,00%**

Tabel 3.1.7: Komposisi Data Realisasi Penerimaan BBNKB Th.2019

- Komposisi realisasi penerimaan BBNKB tahun 2020

No	UNSUR BBNKB	JUMLAH		KONTRIBUSI
		Unit	BBNKB POKOK	(%)
1	BBNKB KENDARAAN BARU	240,011	1.472.165.457.800	98,16%
2	BBNKB KENDARAAN DU	2.148.131	5.536.174.000	0,37%
3	BBNKB MUTASI MASUK DALAM PROVINSI	20,281	5.932.881.000	0,40%
4	BBNKB MUTASI MASUK LUAR PROVINSI	25,907	16.181.185.000	1,08%
	JUMLAH SELURUHNYA	**2.434.330**	**1.499.815.697.800**	**100,00%**

Tabel 3.1. 8: Komposisi Data Realisasi Penerimaan BBNKB Th.2020

Kesimpulan dari data komposisi realisasi penerimaan PKB tahun 2017 s/d tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. BBNKB dari unsur Kendaraan Baru

   a) Kontribusi BBNKB yang berasal dari kendaraan baru terhadap total penerimaan BBNKB tahun 2017 ke tahun 2018, secara persentase naik 10,25% atau sebesar Rp. 197.988.298.000,-, dan dari jumlah unit juga mengalami kenaikan/peningkatan sebanyak 30.732 unit;

   b) Kontribusi BBNKB yang berasal dari kendaraan baru terhadap total penerimaan BBNKB tahun 2018 ke tahun 2019, secara persentase naik 9,15% atau sebesar Rp. 194.774.691.500,-, dan dari jumlah unit juga mengalami kenaikan/peningkatan sebanyak 15.750 unit;

   c) Kontribusi BBNKB yang berasal dari kendaraan baru terhadap total penerimaan BBNKB tahun 2019 ke tahun 2020, secara persentase turun 36,64% atau sebesar Rp. 851.466.861.700,-, dan dari jumlah unit juga mengalami penurunan sebanyak 172.932 unit.

   d) Kontribusi BBNKB yang berasal dari kendaraan baru terhadap total penerimaan BBNKB tahun 2020 ke tahun 2021, secara persentase naik 32,46% atau sebesar Rp. 477.850.952.000,-, dan dari jumlah unit juga mengalami kenaikan sebanyak 30.726 unit. Kondisi seperti ini dapat diasumsikan mendandakan adanya situasi perekonomian yang lebih membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya ditengah pandemic yang masih berlangsung.

2. BBNKB dari unsur Kendaraan Daftar Ulang (Ganti Kepemilikan)

   a) Kontribusi BBNKB yang berasal dari kendaraan pendaftaran ulang ganti kepemilikan terhadap total penerimaan BBNKB tahun 2017 ke tahun 2018, secara persentase naik 3,62% atau sebesar Rp. 358.574.497,-, dan dari jumlah unit juga mengalami kenaikan/peningkatan sebanyak 167.811.000 unit;

   b) Kontribusi BBNKB yang berasal dari kendaraan pendaftaran ulang ganti kepemilikan terhadap total penerimaan BBNKB tahun 2018 ke tahun 2019, secara persentase turun 13,23% atau sebesar Rp. 1.357.475.400,-, dari jumlah unit mengalami kenaikan/peningkatan sebanyak 121.176 unit;

   c) Kontribusi BBNKB yang berasal dari kendaraan pendaftaran ulang ganti kepemilikan terhadap total penerimaan BBNKB tahun 2019 ke

tahun 2020, secara persentase turun 37,84% atau sebesar Rp. 3.370.326.300,-, dan dari jumlah unit juga mengalami penurunan sebanyak 534.252.000 unit.

d) Kontribusi BBNKB yang berasal dari kendaraan pendaftaran ulang ganti kepemilikan terhadap total penerimaan BBNKB tahun 2020 ke tahun 2021, secara persentase naik 51,92% atau sebesar Rp. 2.872.271.800,-, dan dari jumlah unit juga mengalami kenaikan sebanyak 5.913 unit.

3. BBNKB dari unsur Kendaraan Mutasi Masuk dari Dalam Daerah

a) Kontribusi BBNKB yang berasal dari kendaraan mutasi masuk dari dalam daerah terhadap total penerimaan BBNKB tahun 2017 ke tahun 2018, secara persentase naik 1,40% atau sebesar Rp. 143.626.000,-, namun dari jumlah unit mengalami penurunan sebanyak 3.84 unit;

b) Kontribusi BBNKB yang berasal dari kendaraan mutasi masuk dari dalam daerah terhadap total penerimaan BBNKB tahun 2018 ke tahun 2019, secara persentase turun 12,85% atau sebesar Rp. 1.340.345.000,-, dari jumlah unit juga mengalami penurunan sebanyak 4.669 unit;

c) Kontribusi BBNKB yang berasal dari kendaraan mutasi masuk dari dalam daerah terhadap total penerimaan BBNKB tahun 2019 ke tahun 2020, secara persentase turun 34,75% atau sebesar Rp. 3.160.047.000,-, dari jumlah unit juga mengalami penurunan sebanyak 1.665 unit.

d) Kontribusi BBNKB yang berasal dari kendaraan mutasi masuk dari dalam daerah terhadap total penerimaan BBNKB tahun 2020 ke tahun 2021, secara persentase naik 42,11% atau sebesar Rp. 2.498.609.500,-, dari jumlah unit juga mengalami kenaikan sebanyak 3.241 unit.

4. BBNKB dari unsur Kendaraan Mutasi Masuk dari Luar Daerah

a) Kontribusi BBNKB yang berasal dari kendaraan mutasi masuk dari luar daerah terhadap total penerimaan BBNKB tahun 2017 ke tahun 2018, secara persentase naik 37,29% atau sebesar Rp.

6.895.939.700,-, dan dari jumlah unit mengalami kenaikan/peningkatan 4.441 unit;

b) Kontribusi BBNKB yang berasal dari kendaraan mutasi masuk dari luar daerah terhadap total penerimaan BBNKB tahun 2018 ke tahun 2019, secara persentase turun 5,48% atau sebesar Rp. 1.391.953.700,-, dan dari jumlah unit mengalami penurunan sebanyak 3,771 unit;

c) Kontribusi BBNKB yang berasal dari kendaraan mutasi masuk dari luar daerah terhadap total penerimaan BBNKB tahun 2019 ke tahun 2020, secara persentase turun 32,57% atau sebesar Rp. 7.815.692.000,-, dan dari jumlah unit mengalami penurunan sebanyak 3,479 unit;

d) Kontribusi BBNKB yang berasal dari kendaraan mutasi masuk dari luar daerah terhadap total penerimaan BBNKB tahun 2020 ke tahun 2021, secara persentase turun 80,17% atau sebesar Rp. 12.975.142.550,-, dan dari jumlah unit mengalami penurunan sebanyak 12.440 unit, penurunan baik dari jumlah unit kendaraan dan nilai rupiah dari proses mutasi masuk dari luar daerah tersebut disebabkan adanya program dari pemerintah provinsi banten yaitu membebaskan atau menghapus Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kedua dan seterusnya yang berlangsung sejak pertengahan bulan Agustus sampai dengan akhir tahun.

C. Analisa Data Realisasi Penerimaan PKB dan BBNKB

Bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi terhadap capaian penerimaan PKB dan BBNKB dalam satu periode tahun anggaran adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Penerimaan PKB

Pada realisasi penerimaan PKB didalamnya terdapat beberapa unsur PKB yang berasal dari sumber berbeda. Unsur - unsur penerimaan PKB tersebut berdasarkan klasifikasi jenis pendaftaran transaksi wajib pajak berasal/bersumber dari:

1) **Potensi** Pendaftaran Kendaraan Baru

Adalah realisasi penerimaan PKB yang berasal dari pendaftaran kendaraan baru yang mempunyai posisi atau sifat sebagai angka

penambah penerimaan setiap tahun, terlepas dari nilai capaiannya besar atau kecil yang memiliki tingkat sensifitas tinggi oleh pengaruh faktor – faktor seperti pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor, iklim politik dalam negeri, bahkan industri otomotif itu sendiri sebagai pengaruh, dan masih banyak lainya.

2) **Potensi** Pendaftaran Ulang

Adalah penerimaan PKB yang berasal dari pendaftaran ulang tahunan yang mempunyai posisi atau sifat sebagai pengulangan angka penerimaan setiap tahun dan merupakan cermin dari tingkat ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak setiap tahunnya sesuai jatuh tempo pajak.

3) **Potensi** Pendaftaran Kendaraan Tunggakan

Adalah penerimaan PKB yang berasal dari pendaftaran kendaraan tunggakan diatas 1 (satu) tahun yang mempunyai posisi atau sifat sebagai pengulangan angka penerimaan setiap tahun namun tertunda akibat keterlambatan pembayaran pajak, oleh karenanya hal ini merupakan cermin dari penilaian tingkat ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak setiap tahunnya sesuai jatuh tempo pajak.

4) **Potensi** Mutasi Masuk Dalam Daerah

Adalah penerimaan PKB yang berasal dari pendaftaran kendaraan mutasi dalam daerah atau antar SAMSAT dalam satu wilayah provinsi yang mempunyai posisi atau sifat sebagai pengulangan angka penerimaan setiap tahun dan merupakan gambaran dari tingkat transaksi jual beli kendaraan bekas dalam wilayah provinsi banten.

5) **Potensi** Mutasi Masuk dari Luar Provinsi

Adalah penerimaan PKB yang berasal dari pendaftaran kendaraan mutasi masuk dari luar provinsi banten yang mempunyai posisi atau sifat sebagai angka penambah penerimaan dan biasanya juga sangat dipengaruhi oleh faktor kebijakan seperti pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi wajib pajak yang ingin memutasikan kendaraannya ke provinsi banten.

6) **Potensi** Mutasi Keluar

Adalah penerimaan PKB yang berasal dari pendaftaran kendaraan mutasi keluar daerah provinsi banten yang mempunyai posisi atau sifat sebagai angka pengurang penerimaan terhadap potensi penerimaan pendaftaran ulang pada tahun berjalan serta pengurang penerimaan pada Tahun Anggaran berikutnya karena merupakan potensi yang hilang *(lost potency).*

2. Realisasi Penerimaan BBNKB

1) **Potensi** BBNKB Kendaraan Baru

Adalah realisasi penerimaan BBNKB yang berasal dari pendaftaran kendaraan baru yang mempunyai posisi atau sifat sebagai angka penambah penerimaan setiap tahun, terlepas dari nilai capaiannya besar atau kecil yang memiliki tingkat sensifitas tinggi oleh pengaruh faktor – faktor seperti pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor, iklim politik dalam negeri, bahkan industri otomotif itu sendiri sebagai pengaruh, dan masih banyak lainya.

2) **Potensi** BBNKB Pendaftaran Ulang (Ganti Pemilik)

Adalah penerimaan BBNKB yang berasal dari pendaftaran ulang tahunan yang mempunyai posisi atau sifat sebagai penambah angka penerimaan setiap tahun dan merupakan kinerja bagi petugas dalam menggali sumber penerimaan BBNKB II selaras dengan tertib administrasi kepemilikan kendaraan.

3) **Potensi** BBNKB Pendaftaran Mutasi Masuk dari Dalam Provinsi

Adalah penerimaan BBNKB yang berasal dari pendaftaran kendaraan mutasi dalam daerah atau antar SAMSAT dalam satu wilayah provinsi yang mempunyai posisi atau sifat sebagai penambah angka penerimaan setiap tahun dan merupakan gambaran dari tingkat transaksi jual beli kendaraan bekas dalam wilayah provinsi banten.

4) **Potensi** BBNKB Pendaftaran Mutasi Masuk dari Luar Provinsi

Adalah penerimaan BBNKB yang berasal dari pendaftaran kendaraan mutasi masuk dari luar provinsi banten yang mempunyai posisi atau sifat sebagai angka penambah penerimaan dan biasanya juga sangat dipengaruhi oleh faktor kebijakan seperti pembebasan Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi wajib pajak yang ingin memutasikan kendaraannya ke provinsi banten.

D. Simulasi dan Pengujian

1. Definisi Operasional
2. Simulasi Penghitungan

Tabel Metode Penghitungan Capaian PKB dan BBNKB terlampir

E. Landasan Teori Sebagai Dasar

- Menurut Pendit (1992), data adalah hasil observasi langsung terhadap suatu
  kejadian, yang merupakan perlambangan yang mewakili objek atau konsep
  dalam dunia nyata. Hal ini dilengkapi dengan nilai tertentu. Menurut Ralston
  dan Reilly (Chamidi, 2004: 314), data didefinisikan sebagai fakta atau apa yang
  dikatakan sebagai hasil dari suatu observasi terhadap fenomena alam. Sebagai
  hasil observasi langsung terhadap kejadian atau fakta dari fenomena di alam
  nyata, data bisa berupa tulisan atau gambar yang dilengkapi dengan nilai tertentu

Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dapat melihat berbagai aspek kajian yang akan dicapai pada Empat tahun ke depan, aspek-aspek tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan rencana kerja setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1.9
DATA REKAPITULASI POTENSI KENDARAAN PERJENIS s/d TAHUN 2021

POTENSI PERJENIS KENDARAAN	S/D 2021
MOBIL R4	987.640
MOBIL RODA 3	82
SEPEDA MOTOR R2	4.036.879
SEPEDA MOTOR R3	14.283
JUMLAH	**5.038.884**

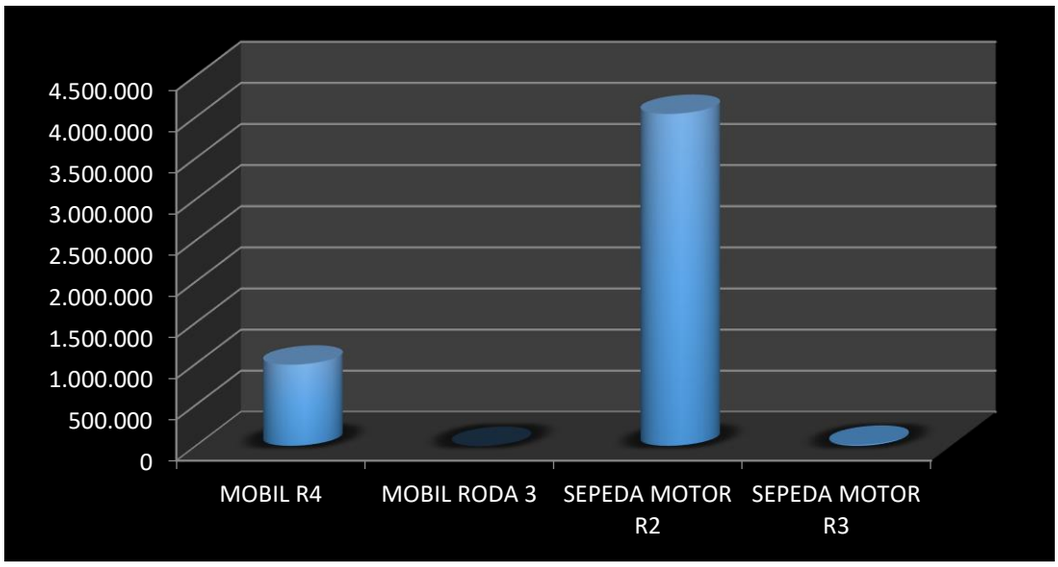

GRAFIK REKAPITULASI POTENSI KENDARAAN PERJENIS S/D TAHUN 2021

Tabel 3.1.10
DATA REKAPITULASI POTENSI KENDARAAN PERJENIS DARI TAHUN S/D TAHUN 2021

NO	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TAHUN S/D 2021
1	Sedan, Sedan Station dan Sejenisnya	60.343
2	Jeep dan Sejenisnya	64.082
3	Minibus Dan Sejenisnya	676.851
4	Microbus dan Sejenisnya	5.366
5	Bus dan Sejenisnya	2.368
6	Pick Up dan Sejenisnya	105.035
7	Truck dan Sejenisnya	73.595
8	Kendaraan Alat-alat Berat	-
9	Sepeda Motor R2	4.036.879
10	SEPEDA MOTOR R3	14.283
11	MOBIL RODA 3	82
JUMLAH		**5.038.884**

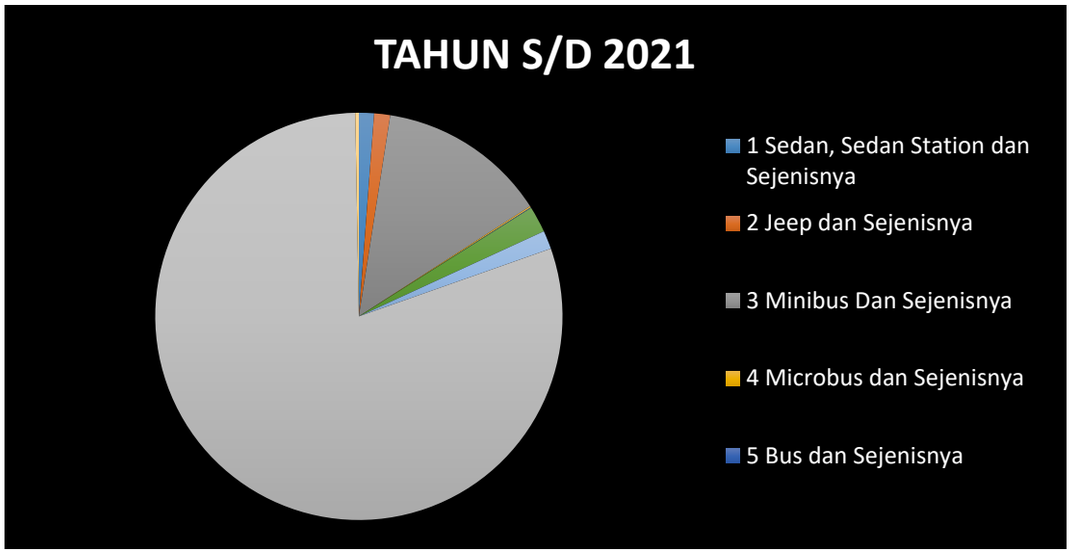

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023 - 2026

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Provinsi Banten, serta mendukung upaya pencapaian Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten yaitu ***"Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa"*** dengan pengertian sebagai berikut :

- Provinsi Banten yang **Maju** berarti adanya perubahan dan kondisi semula ke arah yang lebih baik. Cara-cara lama dalam mengelola pemerintahan ditinggalkan, selanjutnya cara baru dalam mengelola permerintahan yang menerapkan pririsip – prinsip good governanace;
- Provinsi Banten yang **Mandiri** mengacu pada kemampuan keuangan daerah untuk mendukung dan menjalankan pembangunan daerah. Suatu daerah dikatakan mandiri bila pendapatan asli daerahnya dalam APBD cukup dominan, sehingga tidak tergantung oleh bantuan atau subsildi pemerintah pusat. Beberapa indikator Mandiri disini menunjukkan kemampuan fiskal yang cukup untuk merealisasikan berbagai program pemerintah daerah;
- Provinsi Banten yang **Berdaya Saing** berarti kemampuan daerah mengelola dan mengembangkan segenap potensi yang dimiliki serta menghilangkan berbagal hambatan sehingga berhasil menjadi tujuan investasi dibandingkan dengan daerah lainnya. Beberapa parameter berdaya saing ini, berupa kemudahan, fasilitasi dan daya tarik investasi di provinsi Banten seperti infrastruktur yang memadai, keamanan yang terjamin, pelayanan perijinan

yang mudah dan berkepastian hukum, sumber daya manusia yang berkualitas, serta ketersediaan energy;

- Provinsi Banten yang **Sejahtera** berarti kemampuan daerah dalam mengelola aspek manusia yang diukur dengan pencapian angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Beberapa parameter Sejahtera, diukur dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) , yang pencapaiannya melalui kontribusi tiga indikator utama yaitu pencapaian indikator pendidikan, pencapaian indikator kesehatan, dan pencapaian indikator daya beli masyarakat; dan

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup Provinsi Banten.

Dengan melihat dan juga mempertimbangkan dari Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten, maka dapat melihat pontensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang dimilki oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, serta harus mendukung upaya dari Misi Pemerintah Provinsi Banten yaitu :

1. Misi Pertama, Mewujudkan MasyarakatSejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas
2. Misi Kedua, Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan
3. Misi Ketiga, Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari
4. ***Misi Keempat, Mewujudkan PenyelenggaraanPemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa***

Untuk program, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten menetapkan program yang disesuaikan dengan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Adapun program untuk Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dalam rancangan RPD yaitu PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI dan PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH.

Dari telaah visi, misi, dan program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Banten, jika dihubungkan dengan rencana visi, misi, dan program yang akan dirumuskan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, ada beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan.

Adapun faktor penghambat yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten antara lain :

1. Masih Banyaknya Tunggakan WP di atas 5 Tahun;
2. Penetapan Tarif Retribusi yang terlalu rendah dan Terbatasnya Jenis Layanan Retribusi;
3. Belum Adanya Penggalian Potensi Pendapatan di luar Pajak dan retribusi Daerah;
4. hilangnya sumber penerimaan disekitar wilayah sekitar akibat persaingan Regulasi;
5. Hubungan kerjasama dengan mitra kerja pemerintah belum sinergi;
6. Updating Database Belum Optimal;
7. Pelaporan Pendapatan daerah belum berbasis teknologi (E-Monev).

Sedangkan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian rencana visi, misi, dan program Pemerintah Provinsi Banten, antara lain:

1. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan melalui pengembangan inovasi sistem pelayanan dengan menggunakan sistem pelayanan *online* dan elektronik;
2. Pembinaan sumber daya manusia, sumber daya informasi dan sumber daya organisasi;
3. Pengembangan sistem pelaporan yang efektif, transparan dan akuntabel;
4. Peningkatan legalitas dan pendayagunaan aset daerah.

Tabel 3.2.1
Identifikasi Pemetaan Permasalahan
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

Belum Optimalnya Implementasi Reformasi Birokrasi	Belum Optimalnya Pendapatan Daerah	Masih Banyaknya Tunggakan WP di atas 5 Tahun,
		Penetapan Tarif Retribusi yang terlalu rendah dan Terbatasnya Jenis Layanan Retribusi,
		Belum Adanya Penggalian Potensi Pendapatan di luar Pajak dan retribusi Daerah
		hilangnya sumber penerimaan disekitar wilayah sekitar akibat persaingan Regulasi
		Hubungan kerjasama dengan mitra kerja pemerintah belum sinergi

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten semata, akan tetapi perlu dukungan dari *stakeholders* lainnya seperti legislatif, instansi vertikal yang ada di wilayah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupatan/Kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha didalamnya yang berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Provinsi Banten tahun 2023-2026.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka OPD Provinsi Banten berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan prioritas pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga terwujud sinergitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan yang berkesinambungan sampai dengan tahun 2022.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten yang merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi Banten, dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Provinsi Banten tahun 2023-2026, sehingga didalam menentukan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dapat selaras dengan apa yang hendak dicapai oleh Pemerintah Provinsi Banten.

Apabila dilihat dari permasalahan dalam pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dihubungkan dengan telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah, ada beberapa permasalahan dalam pelayanan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Strategi (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, antara lain :

Tabel 3.3.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong	Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif

Tabel 3.3.2
DATA REKAPITULASI POTENSI KENDARAAN PERJENIS DARI TAHUN S/D TAHUN 2021

NO	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TAHUN S/D 2021
1	Sedan, Sedan Station dan Sejenisnya	60.343
2	Jeep dan Sejenisnya	64.082
3	Minibus Dan Sejenisnya	676.851
4	Microbus dan Sejenisnya	5.366
5	Bus dan Sejenisnya	2.368
6	Pick Up dan Sejenisnya	105.035
7	Truck dan Sejenisnya	73.595
8	Kendaraan Alat-alat Berat	-
9	Sepeda Motor R2	4.036.879
10	SEPEDA MOTOR R3	14.283
11	MOBIL RODA 3	82
JUMLAH		**5.038.884**

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Memperhatikan perkembangan pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten selama tahun 2023-2026 sebagai Badan pengelola pendapatan yang ditandai dengan tercapainya target pendapatan daerah pada setiap tahunnya, menunjukan bahwa Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten telah berhasil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menentukan isu isu strategis yang terkait tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten , tidak bisa dilepaskan dari lingkungan strategis, baik pada lingkungan eksternal maupun internalnya. Untuk lingkungan ekternal, isu isu staregis akan dipengaruhi oleh kondisi yang tengah terjadi atau diperkirakan akan tetap berlangsung pada skala internasional, nasional serta regional/local provinsi. Untuk isu isu strategis yang bersumber dari lingkungan ekternal, antara lain meliputi :

1. 8 Area Perubahan
2. Letak Geografis dan Luas Wilayah
3. Target PAD yang semakin meningkat dari sektor Pengelolan pajak yang berkaitan dengan kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor (PKB) maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), selalu akan berkaitan dengan kebijakan industry kendaraan bermotor yang erat dengan kondisi makro ekonomi internasional dan nasional, sebagai konsekwensi dari kebijakan industry yang masih relative tergantung kepada pasukan

mesin dan beberapa suku cadang pabrikan merek merek kendaran di berbagai Negara maju dunia.

4. Pengelolaan pajak rokok, yang dimulai pada awal 2014 turut pula dipengaruhi kebijakan internasional dan nasional terhadap standar kesehatan serta standar internasional untuk kandungan bahan bahan adiktif yang harus memenuhi standar industry dan kesehatan dunia;
5. Sumber-sumber penerimaan yang belum tergali
6. Masih adanya keluhan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik
7. Selain itu, sejalan dengan semangat untuk memperkuat kapasitas pendapatan di luar sektor perpajakan, maka penggalian potensi potensi non pajak dari pendayagunaan asset asset produktif serta perluasan basis usaha badan usaha milik daerah serta sumber pendapatan lainnya, akan terkait dengan kebijakan yang perlu diambil serta arah kebijakan keuangan nasional yang menyertai pengaturan tata kelola pendapatan daerah di era otonomi dewasa ini.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan cita-cita pembangunan Pemerintah Provinsi Banten periode 2023-2026 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten diamanatkan untuk mendukung dan mensukseskan Misi RPD Pemerintah Provinsi Banten **Ke empat** yaitu **"Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Dan Berwibawa"**.

Dengan demikian seluruh kerangka kerja logis urusan Keuangan mulai tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan, berikut indikator kinerjanya ditujukan untuk mendukung dan mensukseskan misi ke empat tersebut.

4.1. Tujuan

Setelah penjelasan keterkaitan antara visi dan misi pada bab sebelumnya selanjutnya dapat dijelaskan juga keterkaitan antara setiap misi dengan tujuan dan sasarannya sebagai interpretasi dari misi yang sudah disusun tersebut. Berikut adalah tabel 4.1 yang menjelaskan kerangka kerja logis antara misi RPD dengan tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah untuk "**Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Dan Berwibawa"** tahun 2026 maka Badan Pendapatan Daerah dengan kewenangannya menuju 'Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (Tujuan Daerah) dengan (Tujuan Perangkat Daerah) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah.

4.2. Sasaran

Setelah penjelasan keterkaitan antara visi dan misi pada bab sebelumnya selanjutnya dapat dijelaskan juga keterkaitan antara setiap misi dengan tujuan dan sasarannya sebagai interpretasi dari misi yang sudah disusun tersebut. Berikut adalah tabel 4.1 yang menjelaskan kerangka kerja logis antara misi RPD dengan tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah untuk **Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Dan Berwibawa"** tahun 2026 maka Badan Pendapatan Daerah dengan kewenangannya menetapkan sasaran (Sasaran Daerah dan Perangkat Daerah) "Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi" di Provinsi Banten dan "Meningkatnya Pendapatan Daerah (IKK : Kemandirian Keuangan)".

Tabel 4.4.1

KERANGKA KERJA LOGIS RENSTRA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023-2026
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPENDA PROVINSI BANTEN

TUJUAN DAERAH/ TUJUAN PD	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	BASELINE	TARGET			
			2021	2023	2024	2025	2026
				TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih							
	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	**55,89**	**82,20**	**84,30**	**86,00**	**87,60**
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaran Pemerintah pada perangkat daerah							
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaran Pemerintah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	**60**	**70-80 Nilai**	**70-80 Nilai**	**70-80 Nilai**	**70-80 Nilai**
Terwujudnya kemandirian keuangan daerah	**Meningkatnya Pendapatan Daerah**	**Indeks Kemandirian Keuangan Daerah**	**60,29**	**69,73**	**69,26**	**68,81**	**68,39**

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dari tujuan jangka menengah yang dijadikan sebagai acuan, dan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten mempunyai strategi dan kebijakan operasional yang tepat dan berkesinambungan yang akan dijadikan pijakan dalam melaksanakan pembangunan periode tahun 2023-2026 yang menjadi terjemahan dari visi dan misi RPD Provinsi Banten :

5.1.1 Strategi RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026 pada Badan Pendapatan Daerah adalah :

a) *Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan*
b) *Meningkatkan akuntabilitas keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah*
c) *Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN*
d) *Meningkatkan pelayanan publik*

5.1.2 Strategi Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 adalah :

a) *Meningkatkan akuntabilitas keuangan penyelenggaraan pemerintahan*
b) *Peningkatan Pendapatan asli Daerah.*

5.1.3 Arah Kebijakan RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026 pada Badan Pendapatan Daerah adalah:

a) *Peningkatan kualitas dokumen perencanaan kinerja pemerintahan*
b) *Peningkatan efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan*
c) *Peningkatan kualitas pelaporan kinerja Perangkat Daerah*
d) *Peningkatan kualitas evaluasi internal SAKIP Perangkat Daerah*
e) *Peningkatan kualitas hubungan lintas fungsi yang mendukung pencapaian kinerja*
f) *Peningkatan kualitas penatausahaan kinerja keuangan pemerintah daerah*
g) *Peningkatan pembinaan dan pengawasan pelayanan publik berbasiskan e-government*
h) *Peningkatan manajemen dan profesionalisme Aparatur*
i) *Peningkatan kualitas dan implementasi kebijakan, Kajian dan Inovasi pelayanan publik*
j) *Peningkatan pengawasan dan pembinaan internal*

5.1.4 Arah Kebijakan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 adalah :

a) *Peningkatan kualtas penatausahaan kinerja keuangan pemerintahan daerah dan pendapatan daerah;*
b) *Penambahan Pembangunan unit layanan Pajak;*
c) *Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana layanan Pajak*

sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.1

TABEL 5.5.1
STRATEGI DAN KEBIJAKAN visi, misi RPD Provinsi Banten 2023-2026

VISI	***"BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH"***			
MISI 4	**Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa**			
NO.	**TUJUAN**	**SASARAN**	**STRATEGI**	**KEBIJAKAN**
1	2	3	4	5
1.	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih.**	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan akuntabilitas keuangan penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan
		Meningkatnya Pendapatan Daerah	Peningkatan Pendapatan asli Daerah	1. Penambahan Pembangunan unit layanan Pajak 2. Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana layanan Pajak

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN MNGGUNAKAN ANALISIS SWOT

Untuk pengembangan pelayanan BAPENDA Provinsi Banten terdapat

Kekuatan (Strength)

- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai kewenangan penuh dalam pengelolaan pendapatan daerah
- Tersedianya dukungan pimpinan daerah yang sangat kuat dan sumber dana yang sangat memadai untuk menjalankan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;
- Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se Banten merupakan kepanjangan tangan Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Banten dalam menjalankan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;

- Budaya kerja, disiplin dan komitmen yang kuat seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik;
- Terjalinnya koordinasi dan sinergitas secara baik antar institusi terkait pemungutan Pendapatan Asli Daerah Untuk Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Terhadap Masyarakat;
- Pola pengembangan jenis pelayanan dengan memanfatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi;
- Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

Kelemahan (Weakness)

- Belum terstandarisasinya kuantitas dan kualitas Aparatur yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pendapatan daerah;
- Kurangnya koordinasi baik antara organisasi perangkat daerah penghasil yang melakukan pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah;
- Kurang terpadunya (integrasi) pengelolaan data dan informasi pengelolaan pendapatan daerah yang akurat dan teruji;
- Kurang terjalinnya koordinasi dan sinergitas secara baik dengan pemerintah Kab/Kota dalam optimaliasi Pendapatan Asli Daerah;
- Belum Optimlanya pemanfaatan aset daerah (tanah, bangunan, dan jenis asset lainnya) Pemerintah Provinsi Banten yang dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan baru;

Peluang (Opportunity)

- Tuntutan kualitas pelayanan yang semakin tinggi dari masyarakat;
- Infrastruktur teknologi informasi semakin maju dan merata, sehingga pengembangan pelayanan kedepan akan lebih dialihkan pada model bekerjasama dengan mitra berbasis teknologi informasi;
- Adanya kecenderungan peningkatan potensi jumlah kendaraan bermotor terdaftar di Provinsi Banten sebagai faktor pendorong peningkatan PKB dan BBNKB;
- Dukungan regulasi terhadap Optimaliasi Pendapatan Asli Daerah

- Pemanfaatan aset daerah (tanah, bangunan, dan jenis asset lainnya) Pemerintah Provinsi Banten yang dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan baru;
- Masih tetap terbukanya pemanfaatan potensi pendapatan untuk diintensifikasi maupun ekstensifikasi, baik melalui instrument tarif maupun pengembangan potensi baru;
- Terbukanya peluang kerjasama dengan BUMN-BUMN yang ada di Provinsi Banten dalam rangka pengelolaan fungsi dari BUMN tersebut sebagai salah satu potensi sumber pendapatan, dengan adanya rencana Proyek Strategis Nasional dimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 yang akan menjadi faktor peningkatan perekonomian masyarakat di Provinsi Banten dan menjadi potensi sumber pendapatan daerah.

Ancaman (Threat)

- Rendahnya tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak tepat waktu;
- Masih belum stabilnya kondisi perekonomian nasional dan internasional yang berpeluang berdampak terhadap industri otomotif sebagai penopang utama perpajakan daerah provinsi;
- Adanya potensi hilangnya sumber penerimaan (pajak daerah) di sekitar wilayah perbatasan akibat persaingan regulasi maupun pelayanan pendapatan daerah dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat;
- Kurang optimal pengelolaan sumber-sumber pendapatan Asli daerah yang dikelola oleh OPD penghasil.

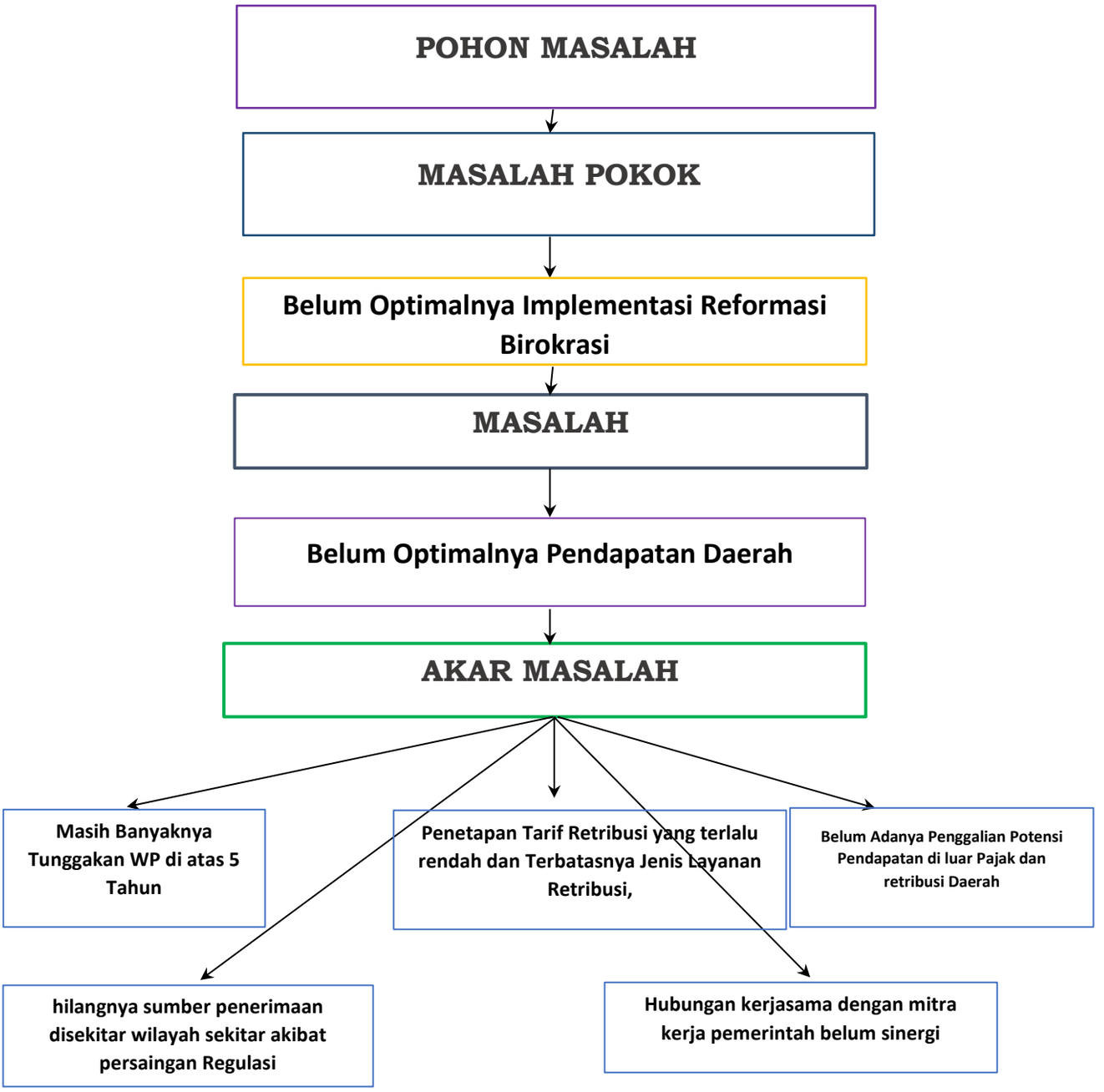

Sumber data : analisis SWOT Bapenda

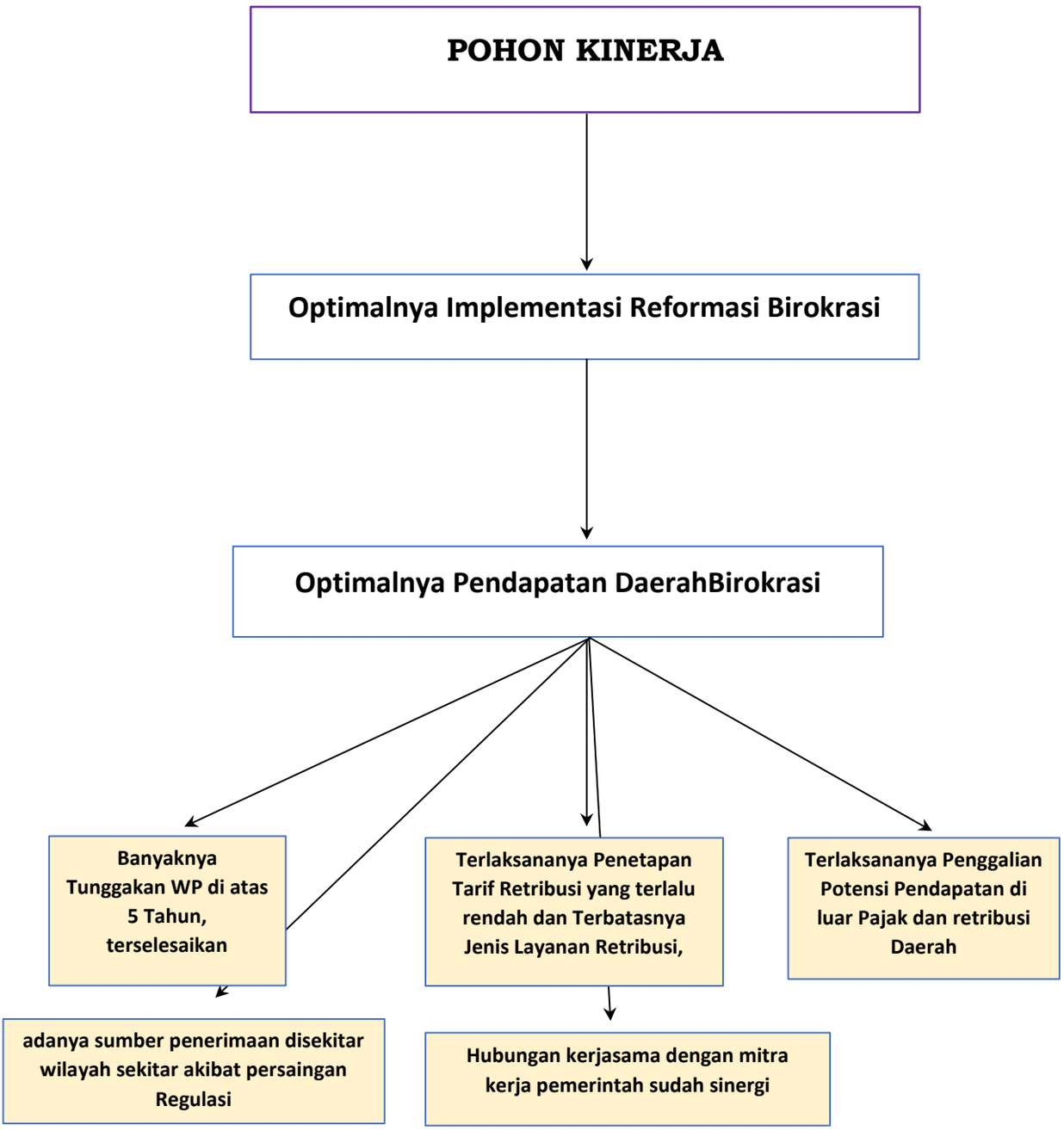
POHON KINERJA
Optimalnya Implementasi Reformasi Birokrasi
Optimalnya Pendapatan DaerahBirokrasi
Banyaknya Tunggakan WP di atas 5 Tahun, terselesaikan
Terlaksananya Penetapan Tarif Retribusi yang terlalu rendah dan Terbatasnya Jenis Layanan Retribusi,
Terlaksananya Penggalian Potensi Pendapatan di luar Pajak dan retribusi Daerah
adanya sumber penerimaan disekitar wilayah sekitar akibat persaingan Regulasi
Hubungan kerjasama dengan mitra kerja pemerintah sudah sinergi

BAB VI

6.1 RENCANA PROGRAM & KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang bidang keuangan serta tugas pembantuan, Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu indikatifnya sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPD, selanjutnya dijabarkan Badan Pendapatan Daerah ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Pendaptan Daerah.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indkator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Badan Pendapatan Daerah.Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu organisasi perangkat daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi perangkat daerah. Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolok ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian 'bersifat indikatif' dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Dari Misi ke-4 Pemerintah Provinsi Banten sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten tahun 2023-2026, yakni**, Mewujudkan PenyelenggaraanPemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.**

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan maka program-program yang akan di dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dalam kurun waktu 2023-2026 menurut kebijakan yang ditetapkan meliputi :**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**.

dibawah ini dijelaskan pagu indikatif Sesuai Pergub RPD Nomor 3 Tahun 2022 berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan selama kurun waktu tahun 2023 -2026 sebagai berikut :

Tabel 6.6.1 Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Selama Kurun Waktu Tahun 2023-2026

Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 Program, Kegiatan, Sub Kegiataan dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
INDUK																	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**100.00 %**	**100 %**	**245.241.372.939,00**	**100 %**	**247.217.455.419,00**	**100 %**	**239.478.648.386,00**	**100 %**	**253.859.559.903,00**	**100 %**	**985.797.036.647,00**	Badan Pendapatan Daerah	
		5.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**500.000.000,00**	**100 %**	**505.000.000,00**	**100 %**	**510.050.000,00**	**100 %**	**515.150.500,00**	**100 %**	**2.030.200.500,00**	Badan Pendapatan Daerah	
		5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	207.192.200,00	5 Dokumen	209.264.122,00	5 Dokumen	211.356.763,00	5 Dokumen	213.470.330,00	5 Dokumen	841.283.415,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	18.889.000,00	2 Dokumen	19.077.890,00	2 Dokumen	19.268.669,00	2 Dokumen	19.461.356,00	2 Dokumen	76.696.915,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	18.889.000,00	2 Dokumen	19.077.890,00	2 Dokumen	19.268.669,00	2 Dokumen	19.461.356,00	2 Dokumen	76.696.915,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	17.350.200,00	2 Dokumen	17.523.702,00	2 Dokumen	17.698.939,00	2 Dokumen	17.875.928,00	2 Dokumen	70.448.769,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	17.350.200,00	2 Dokumen	17.523.702,00	2 Dokumen	17.698.939,00	2 Dokumen	17.875.928,00	2 Dokumen	70.448.769,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	102.802.600,00	12 Laporan	103.830.626,00	12 Laporan	104.868.932,00	12 Laporan	105.917.622,00	12 Laporan	417.419.780,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	5 Laporan	117.526.800,00	5 Laporan	118.702.068,00	5 Laporan	119.889.089,00	5 Laporan	121.087.980,00	5 Laporan	477.205.937,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten

		5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah**	**100 %**	**100 %**	**183.873.586.100,00**	**100 %**	**192.989.390.042,00**	**100 %**	**202.559.426.323,00**	**100 %**	**212.606.376.709,00**	**100 %**	**792.028.779.174,00**	Badan Pendapatan Daerah	
		5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	355 Orang/ Bulan	355 Orang/ Bulan	181.400.805.200,00	355 Orang/ Bulan	190.467.153.524,00	355 Orang/ Bulan	199.986.745.074,00	355 Orang/ Bulan	209.982.241.836,00	355 Orang/ Bulan	781.836.945.634,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	157 Dokumen	157 Dokumen	2.201.950.000,00	157 Dokumen	2.245.989.000,00	157 Dokumen	2.290.908.780,00	157 Dokumen	2.336.726.956,00	157 Dokumen	9.075.574.736,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	1 Dokumen	9.999.900,00	1 Dokumen	10.199.898,00	1 Dokumen	10.403.896,00	1 Dokumen	10.611.974,00	1 Dokumen	41.215.668,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	36.621.900,00	12 Dokumen	37.354.338,00	12 Dokumen	38.101.425,00	12 Dokumen	38.863.453,00	12 Dokumen	150.941.116,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	93.754.500,00	1 Laporan	95.629.590,00	1 Laporan	97.542.182,00	1 Laporan	99.493.025,00	1 Laporan	386.419.297,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	20.310.000,00	1 Dokumen	20.716.200,00	1 Dokumen	21.130.524,00	1 Dokumen	21.553.134,00	1 Dokumen	83.709.858,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	1 Laporan	99.999.800,00	1 Laporan	101.999.796,00	1 Laporan	104.039.792,00	1 Laporan	106.120.588,00	1 Laporan	412.159.976,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	10.144.800,00	1 Dokumen	10.347.696,00	1 Dokumen	10.554.650,00	1 Dokumen	10.765.743,00	1 Dokumen	41.812.889,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**338.201.200,00**	**100 %**	**344.965.224,00**	**100 %**	**351.864.528,00**	**100 %**	**358.901.819,00**	**100 %**	**1.393.932.771,00**	Badan Pendapatan Daerah	
		5.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	158.201.200,00	1 Dokumen	161.365.224,00	1 Dokumen	164.592.528,00	1 Dokumen	167.884.379,00	1 Dokumen	652.043.331,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1500 Dokumen	1.500 Dokumen	30.000.000,00	1.500 Dokumen	30.600.000,00	1.500 Dokumen	31.212.000,00	1.500 Dokumen	31.836.240,00	1.500 Dokumen	123.648.240,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	12 Laporan	15.000.000,00	12 Laporan	15.300.000,00	12 Laporan	15.606.000,00	12 Laporan	15.918.120,00	12 Laporan	61.824.120,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	42 Laporan	42 Laporan	75.000.000,00	42 Laporan	76.500.000,00	42 Laporan	78.030.000,00	42 Laporan	79.590.600,00	42 Laporan	309.120.600,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	36.000.000,00	12 Laporan	36.720.000,00	12 Laporan	37.454.400,00	12 Laporan	38.203.488,00	12 Laporan	148.377.888,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	14.000.000,00	1 Laporan	14.280.000,00	1 Laporan	14.565.600,00	1 Laporan	14.856.912,00	1 Laporan	57.702.512,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.01.1.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.200.000,00	1 Dokumen	10.404.000,00	1 Dokumen	10.612.080,00	1 Dokumen	41.216.080,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten

		5.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah**	**100 %**	**100 %**	**786.063.660,00**	**100 %**	**796.784.933,00**	**100 %**	**807.720.632,00**	**100 %**	**818.875.045,00**	**100 %**	**3.209.444.270,00**	Badan Pendapatan Daerah	
		5.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	289.032.260,00	3 Paket	289.812.905,00	3 Paket	290.609.164,00	3 Paket	291.421.346,00	3 Paket	1.160.875.675,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	1 Dokumen	18.860.000,00	1 Dokumen	19.237.200,00	1 Dokumen	19.621.944,00	1 Dokumen	20.014.383,00	1 Dokumen	77.733.527,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	31.630.000,00	2 Dokumen	32.262.600,00	2 Dokumen	32.907.852,00	2 Dokumen	33.566.009,00	2 Dokumen	130.366.461,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	3 Dokumen	70.508.000,00	3 Dokumen	71.918.160,00	3 Dokumen	73.356.523,00	3 Dokumen	74.823.654,00	3 Dokumen	290.606.337,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	11 Orang	48.750.000,00	11 Orang	49.725.000,00	11 Orang	50.719.500,00	11 Orang	51.733.890,00	11 Orang	200.928.390,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1 Orang	11.210.000,00	1 Orang	11.434.200,00	1 Orang	11.662.884,00	1 Orang	11.896.142,00	1 Orang	46.203.226,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	263 Orang	263 Orang	316.073.400,00	263 Orang	322.394.868,00	263 Orang	328.842.765,00	263 Orang	335.419.621,00	263 Orang	1.302.730.654,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah**	**100 %**	**100 %**	**9.693.937.000,00**	**100 %**	**9.886.815.740,00**	**100 %**	**10.084.552.055,00**	**100 %**	**10.286.243.096,00**	**100 %**	**39.951.547.891,00**	Badan Pendapatan Daerah	
		5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	251.395.200,00	1 Paket	255.423.104,00	1 Paket	260.531.566,00	1 Paket	265.742.198,00	1 Paket	1.033.092.068,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	764.973.000,00	3 Paket	780.272.460,00	3 Paket	795.877.909,00	3 Paket	811.795.467,00	3 Paket	3.152.918.836,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	9.869.200,00	3 Paket	10.066.584,00	3 Paket	10.267.916,00	3 Paket	10.473.274,00	3 Paket	40.676.974,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	334.238.000,00	1 Paket	340.922.760,00	1 Paket	347.741.215,00	1 Paket	354.696.040,00	1 Paket	1.377.598.015,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.820.547.800,00	1 Paket	7.976.958.756,00	1 Paket	8.136.497.931,00	1 Paket	8.299.227.890,00	1 Paket	32.233.232.377,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	398.640.000,00	2 Laporan	406.612.800,00	2 Laporan	414.745.056,00	2 Laporan	423.039.957,00	2 Laporan	1.643.037.813,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	69.692.300,00	1 Dokumen	71.086.146,00	1 Dokumen	72.507.869,00	1 Dokumen	73.958.026,00	1 Dokumen	287.244.341,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	1 Dokumen	44.581.500,00	1 Dokumen	45.473.130,00	1 Dokumen	46.382.593,00	1 Dokumen	47.310.244,00	1 Dokumen	183.747.467,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten

		5.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**100 %**	**28.631.620.089,00**	**100 %**	**20.863.575.292,00**	**100 %**	**2.882.082.177,00**	**100 %**	**6.559.750.409,00**	**100 %**	**58.937.027.967,00**	Badan Pendapatan Daerah	
		5.02.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	100 Unit	600.000.000,00	100 Unit	648.000.000,00	100 Unit	699.840.000,00	100 Unit	0,00	100 Unit	1.947.840.000,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	100 Unit	6.755.802.675,00	100 Unit	6.890.918.729,00	100 Unit	0,00	100 Unit	402.423.553,00	100 Unit	14.049.144.957,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	100 Paket	2.662.131.839,00	100 Paket	2.765.461.115,00	100 Paket	439.652.076,00	100 Paket	1.907.326.856,00	100 Paket	7.774.571.886,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	110 Unit	100 Unit	10.125.560.575,00	100 Unit	7.559.195.448,00	100 Unit	742.590.101,00	100 Unit	2.000.000.000,00	100 Unit	20.427.346.124,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100 Unit	6.805.500.000,00	100 Unit	2.000.000.000,00	100 Unit	0,00	100 Unit	1.250.000.000,00	100 Unit	10.055.500.000,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100 Unit	1.682.625.000,00	100 Unit	1.000.000.000,00	100 Unit	1.000.000.000,00	100 Unit	1.000.000.000,00	100 Unit	4.682.625.000,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**100 %**	**19.099.746.440,00**	**100 %**	**19.481.741.369,00**	**100 %**	**19.871.886.196,00**	**100 %**	**20.270.374.520,00**	**100 %**	**78.723.748.525,00**	Badan Pendapatan Daerah	
		5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.532.381.500,00	12 Laporan	1.563.029.130,00	12 Laporan	1.594.289.713,00	12 Laporan	1.626.175.507,00	12 Laporan	6.315.875.850,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	101.363.300,00	12 Laporan	103.390.566,00	12 Laporan	105.458.377,00	12 Laporan	107.567.545,00	12 Laporan	417.779.788,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17 Laporan	17 Laporan	17.466.001.640,00	17 Laporan	17.815.321.673,00	17 Laporan	18.172.138.106,00	17 Laporan	18.536.631.468,00	17 Laporan	71.990.092.887,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten

5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**100 %**	**2.318.218.450,00**	**100 %**	**2.349.182.819,00**	**100 %**	**2.411.066.475,00**	**100 %**	**2.443.887.805,00**	**100 %**	**9.522.355.549,00**	Badan Pendapatan Daerah	
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	6 Unit	210.460.000,00	6 Unit	214.669.200,00	6 Unit	218.962.584,00	6 Unit	223.341.836,00	6 Unit	867.433.620,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	34 Unit	750.812.300,00	34 Unit	765.828.546,00	34 Unit	781.145.117,00	34 Unit	796.768.019,00	34 Unit	3.094.553.982,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
5.02.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	25 Unit	23.332.700,00	25 Unit	23.799.354,00	25 Unit	24.275.341,00	25 Unit	24.760.848,00	25 Unit	96.168.243,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	176 Unit	100 Unit	338.391.800,00	100 Unit	345.159.636,00	100 Unit	352.062.829,00	100 Unit	359.104.085,00	100 Unit	1.394.718.350,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	368.049.450,00	1 Unit	360.010.439,00	1 Unit	382.110.647,00	1 Unit	374.352.861,00	1 Unit	1.484.523.397,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75 Unit	627.172.200,00	75 Unit	639.715.644,00	75 Unit	652.509.957,00	75 Unit	665.560.156,00	75 Unit	2.584.957.957,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten

	Meningkatnya Pendapatan Daerah	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Peningkatan Pajak Daerah**	**8 %**	**5,85 %**	**14.970.000.000,00**	**5,85 %**	**13.277.199.999,00**	**5,35 %**	**12.485.641.999,00**	**5,35 %**	**13.599.128.740,00**	**5,35 %**	**54.331.970.738,00**	Badan Pendapatan Daerah	
				Presentase Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain (Persen)	**2,96 %**	**2,9 %**	**0,00**	**4,56 %**	**0,00**	**4,57 %**	**0,00**	**4,56 %**	**0,00**	**4,56 %**	**0,00**		
		5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**100 %**	**100 %**	**14.970.000.000,00**	**100 %**	**13.277.199.999,00**	**100 %**	**12.485.641.999,00**	**100 %**	**13.599.128.740,00**	**100 %**	**54.331.970.738,00**	Badan Pendapatan Daerah	
		5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	1 Dokumen	404.000.000,00	1 Dokumen	408.040.000,00	1 Dokumen	412.120.400,00	1 Dokumen	1.624.160.400,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	2 Laporan	600.000.000,00	2 Laporan	606.000.000,00	2 Laporan	612.060.000,00	2 Laporan	618.180.600,00	2 Laporan	2.436.240.600,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	1 Laporan	1.010.000.000,00	1 Laporan	1.020.100.000,00	1 Laporan	1.030.301.000,00	1 Laporan	4.060.401.000,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	5 Laporan	300.000.000,00	5 Laporan	303.000.000,00	5 Laporan	306.030.000,00	5 Laporan	309.090.300,00	5 Laporan	1.218.120.300,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	1 Laporan	1.010.000.000,00	1 Laporan	1.020.100.000,00	1 Laporan	1.030.301.000,00	1 Laporan	4.060.401.000,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	-	24 Dokumen Ketetapan	5.000.000.000,00	24 Dokumen Ketetapan	5.400.000.000,00	24 Dokumen Ketetapan	5.832.000.000,00	24 Dokumen Ketetapan	6.298.560.000,00	24 Dokumen Ketetapan	22.530.560.000,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	-	1 Laporan	160.000.000,00	1 Laporan	172.199.999,00	1 Laporan	184.363.999,00	1 Laporan	199.568.880,00	1 Laporan	716.132.878,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.04.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	252.500.000,00	1 Dokumen	255.025.000,00	1 Dokumen	257.575.250,00	1 Dokumen	1.015.100.250,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	6 Dokumen SSPD	180 Dokumen SSPD	3.910.000.000,00	180 Dokumen SSPD	1.708.000.000,00	180 Dokumen SSPD	371.448.000,00	180 Dokumen SSPD	898.246.360,00	180 Dokumen SSPD	6.887.694.360,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.04.1.01.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	1 Dokumen Surat Persetujuan /Penolakan	1 Dokumen Surat Persetujuan /Penolakan	550.000.000,00	1 Dokumen Surat Persetujuan /Penolakan	555.500.000,00	1 Dokumen Surat Persetujuan /Penolakan	561.055.000,00	1 Dokumen Surat Persetujuan/ Penolakan	566.665.550,00	1 Dokumen Surat Persetujuan/ Penolakan	2.233.220.550,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Laporan	3 Laporan	800.000.000,00	3 Laporan	811.000.000,00	3 Laporan	822.170.000,00	3 Laporan	833.512.900,00	3 Laporan	3.266.682.900,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan	2 Laporan	500.000.000,00	2 Laporan	505.000.000,00	2 Laporan	510.050.000,00	2 Laporan	515.150.500,00	2 Laporan	2.030.200.500,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
		5.02.04.1.01.14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-	1 Laporan	500.000.000,00	1 Laporan	540.000.000,00	1 Laporan	583.200.000,00	1 Laporan	629.856.000,00	1 Laporan	2.253.056.000,00	Badan Pendapatan Daerah	Banten
JUMLAH							**260.211.372.939,00**		**260.494.655.418,00**		**251.964.290.385,00**		**267.458.688.643,00**		**1.040.129.007.385,00**		

UPTD PPD SERANG																	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**-**	**-**	**2.802.393.310,00**	**-**	**2.858.441.176,00**	**-**	**2.915.610.000,00**	**-**	**2.973.922.200,00**	**-**	**11.550.366.686,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang	
		5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada UPTD PPD Serang**	**100 %**	**100 %**	**548.942.194,00**	**100 %**	**559.921.038,00**	**100 %**	**571.119.459,00**	**100 %**	**582.541.848,00**	**100 %**	**2.262.524.539,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang	
		5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.834.440,00	1 Paket	11.051.129,00	1 Paket	11.272.151,00	1 Paket	11.497.596,00	1 Paket	44.655.316,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang	Banten
		5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	262.856.040,00	1 Paket	268.113.161,00	1 Paket	273.475.424,00	1 Paket	278.944.932,00	1 Paket	1.083.389.557,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang	Banten
		5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	19.071.574,00	1 Paket	19.453.005,00	1 Paket	19.842.066,00	1 Paket	20.238.907,00	1 Paket	78.605.552,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang	Banten
		5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	86.394.000,00	1 Paket	88.121.880,00	1 Paket	89.884.318,00	1 Paket	91.682.004,00	1 Paket	356.082.202,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang	Banten
		5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	98.588.100,00	1 Paket	100.559.862,00	1 Paket	102.571.059,00	1 Paket	104.622.480,00	1 Paket	406.341.501,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang	Banten
		5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	12.609.240,00	1 Laporan	12.861.425,00	1 Laporan	13.118.653,00	1 Laporan	13.381.026,00	1 Laporan	51.970.344,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang	Banten
		5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	58.588.800,00	2 Dokumen	59.760.576,00	2 Dokumen	60.955.788,00	2 Dokumen	62.174.903,00	2 Dokumen	241.480.067,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang	Banten
		5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Serang**	**100 %**	**100 %**	**1.801.000.373,00**	**100 %**	**1.837.020.380,00**	**100 %**	**1.873.760.788,00**	**100 %**	**1.911.236.004,00**	**100 %**	**7.423.017.545,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang	
		5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	595.309.373,00	12 Laporan	607.215.560,00	12 Laporan	619.359.872,00	12 Laporan	631.747.069,00	12 Laporan	2.453.631.874,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang	Banten
		5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	130.968.000,00	12 Laporan	133.587.360,00	12 Laporan	136.259.107,00	12 Laporan	138.984.289,00	12 Laporan	539.798.756,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang	Banten
		5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	1.074.723.000,00	12 Laporan	1.096.217.460,00	12 Laporan	1.118.141.809,00	12 Laporan	1.140.504.646,00	12 Laporan	4.429.586.915,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang	Banten

		5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Serang**	**100 %**	**100 %**	**452.450.743,00**	**100 %**	**461.499.758,00**	**100 %**	**470.729.753,00**	**100 %**	**480.144.348,00**	**100 %**	**1.864.824.602,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang	
		5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	5 Unit	46.318.200,00	5 Unit	47.244.564,00	5 Unit	48.189.455,00	5 Unit	49.153.244,00	5 Unit	190.905.463,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang	Banten
		5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	6 Unit	201.480.600,00	6 Unit	205.510.212,00	6 Unit	209.620.416,00	6 Unit	213.812.825,00	6 Unit	830.424.053,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang	Banten
		5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	138 Unit	75 Unit	110.496.600,00	75 Unit	112.706.532,00	75 Unit	114.960.663,00	75 Unit	117.259.876,00	75 Unit	455.423.671,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang	Banten
		5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	53.355.343,00	1 Unit	54.422.450,00	1 Unit	55.510.899,00	1 Unit	56.621.117,00	1 Unit	219.909.809,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang	Banten
		5.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	40.800.000,00	1 Unit	41.616.000,00	1 Unit	42.448.320,00	1 Unit	43.297.286,00	1 Unit	168.161.606,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang	Banten
	Meningkatnya Pendapatan Daerah	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**		**-**	**-**	**1.012.224.100,00**	**-**	**1.032.468.582,00**	**-**	**1.053.117.954,00**	**-**	**1.074.180.313,00**	**-**	**4.171.990.949,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang	
		5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada UPTD PPD Serang**	**100 %**	**100 %**	**1.012.224.100,00**	**100 %**	**1.032.468.582,00**	**100 %**	**1.053.117.954,00**	**100 %**	**1.074.180.313,00**	**100 %**	**4.171.990.949,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang	
		5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	31676 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	1.800.000.000,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang	Banten
		5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen Ketetapan	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	120.000.000,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang	Banten
		5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	-	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	80.000.000,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang	Banten
		5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	18000 Dokumen SSPD	2 Dokumen SSPD	512.224.100,00	2 Dokumen SSPD	532.468.582,00	2 Dokumen SSPD	553.117.954,00	2 Dokumen SSPD	574.180.313,00	2 Dokumen SSPD	2.171.990.949,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang	Banten
JUMLAH							**3.814.617.410,00**		**3.890.909.758,00**		**3.968.727.954,00**		**4.048.102.513,00**		**15.722.357.635,00**		

UPTD PPD CIKANDE																	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**-**	**-**	**3.704.092.808,00**	**-**	**3.778.174.664,00**	**-**	**3.853.738.157,00**	**-**	**3.930.812.921,00**	**-**	**15.266.818.550,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande	
		5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada UPTD PPD Cikande**	**100 %**	**100 %**	**463.640.010,00**	**100 %**	**472.912.810,00**	**100 %**	**482.371.066,00**	**100 %**	**492.018.488,00**	**100 %**	**1.910.942.374,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande	
		5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	21.552.600,00	1 Paket	21.983.652,00	1 Paket	22.423.326,00	1 Paket	22.871.791,00	1 Paket	88.831.369,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande	Banten
		5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	144.898.650,00	1 Paket	147.796.623,00	1 Paket	150.752.555,00	1 Paket	153.767.607,00	1 Paket	597.215.435,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande	Banten
		5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	31.220.160,00	1 Paket	31.844.563,00	1 Paket	32.481.454,00	1 Paket	33.131.084,00	1 Paket	128.677.261,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande	Banten
		5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	42.330.000,00	1 Paket	43.176.600,00	1 Paket	44.040.132,00	1 Paket	44.920.935,00	1 Paket	174.467.667,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande	Banten
		5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	143.238.600,00	1 Paket	146.103.372,00	1 Paket	149.025.439,00	1 Paket	152.005.948,00	1 Paket	590.373.359,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande	Banten
		5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	20.400.000,00	1 Laporan	20.808.000,00	1 Laporan	21.224.160,00	1 Laporan	21.648.643,00	1 Laporan	84.080.803,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande	Banten
		5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000,00	2 Dokumen	61.200.000,00	2 Dokumen	62.424.000,00	2 Dokumen	63.672.480,00	2 Dokumen	247.296.480,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande	Banten
		5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Cikande**	**100 %**	**100 %**	**2.560.836.888,00**	**100 %**	**2.612.053.626,00**	**100 %**	**2.664.294.698,00**	**100 %**	**2.717.580.592,00**	**100 %**	**10.554.765.804,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande	
		5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.081.175.928,00	12 Laporan	1.102.799.447,00	12 Laporan	1.124.855.435,00	12 Laporan	1.147.352.544,00	12 Laporan	4.456.183.354,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande	Banten
		5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	12 Laporan	518.976.000,00	12 Laporan	529.355.520,00	12 Laporan	539.942.631,00	12 Laporan	550.741.483,00	12 Laporan	2.139.015.634,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande	Banten
		5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	12 Laporan	960.684.960,00	12 Laporan	979.898.659,00	12 Laporan	999.496.632,00	12 Laporan	1.019.486.565,00	12 Laporan	3.959.566.816,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande	Banten

		5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Cikande**	**100 %**	**100 %**	**679.615.910,00**	**100 %**	**693.208.228,00**	**100 %**	**707.072.393,00**	**100 %**	**721.213.841,00**	**100 %**	**2.801.110.372,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande	
		5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	5 Unit	34.078.200,00	5 Unit	34.759.764,00	5 Unit	35.454.959,00	5 Unit	36.164.058,00	5 Unit	140.456.981,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande	Banten
		5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	6 Unit	174.042.600,00	6 Unit	177.523.452,00	6 Unit	181.073.922,00	6 Unit	184.695.399,00	6 Unit	717.335.373,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande	Banten
		5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	129 Unit	75 Unit	155.601.000,00	75 Unit	158.713.020,00	75 Unit	161.887.280,00	75 Unit	165.125.026,00	75 Unit	641.326.326,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande	Banten
		5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	265.894.110,00	1 Unit	271.211.992,00	1 Unit	276.636.232,00	1 Unit	282.168.958,00	1 Unit	1.095.911.292,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande	Banten
		5.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	50.000.000,00	1 Unit	51.000.000,00	1 Unit	52.020.000,00	1 Unit	53.060.400,00	1 Unit	206.080.400,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande	Banten
	Meningkatnya Pendapatan Daerah	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**		**-**	**-**	**1.050.400.000,00**	**-**	**1.071.408.000,00**	**-**	**1.092.836.160,00**	**-**	**1.114.692.883,00**	**-**	**4.329.337.043,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande	
		5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada UPTD PPD Cikande**	**100 %**	**100 %**	**1.050.400.000,00**	**100 %**	**1.071.408.000,00**	**100 %**	**1.092.836.160,00**	**100 %**	**1.114.692.883,00**	**100 %**	**4.329.337.043,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande	
		5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	39523 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	1.800.000.000,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande	Banten
		5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	37 Dokumen Ketetapan	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	120.000.000,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande	Banten
		5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	-	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	80.000.000,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande	Banten
		5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	500 Dokumen SSPD	37 Dokumen SSPD	550.400.000,00	37 Dokumen SSPD	571.408.000,00	37 Dokumen SSPD	592.836.160,00	37 Dokumen SSPD	614.692.883,00	37 Dokumen SSPD	2.329.337.043,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande	Banten
JUMLAH							**4.754.492.808,00**		**4.849.582.664,00**		**4.946.574.317,00**		**5.045.505.804,00**		**19.596.155.593,00**		

UPTD PPD PANDEGLANG																	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**-**	**-**	**2.036.527.500,00**	**-**	**2.062.505.330,00**	**-**	**2.103.417.995,00**	**-**	**2.130.632.294,00**	**-**	**8.333.083.119,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang	
		5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada UPTD PPD Pandeglang**	**100 %**	**100 %**	**427.615.500,00**	**100 %**	**436.167.810,00**	**100 %**	**444.891.166,00**	**100 %**	**453.788.990,00**	**100 %**	**1.762.463.466,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang	
		5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	27.003.000,00	1 Paket	27.543.060,00	1 Paket	28.093.921,00	1 Paket	28.655.800,00	1 Paket	111.295.781,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang	Banten
		5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	154.166.500,00	1 Paket	157.249.830,00	1 Paket	160.394.827,00	1 Paket	163.602.723,00	1 Paket	635.413.880,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang	Banten
		5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	21.246.000,00	1 Paket	21.670.920,00	1 Paket	22.104.338,00	1 Paket	22.546.425,00	1 Paket	87.567.683,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang	Banten
		5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	17.100.000,00	1 Paket	17.442.000,00	1 Paket	17.790.840,00	1 Paket	18.146.657,00	1 Paket	70.479.497,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang	Banten
		5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	99.292.000,00	1 Paket	101.277.840,00	1 Paket	103.303.397,00	1 Paket	105.369.465,00	1 Paket	409.242.702,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang	Banten
		5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	68.808.000,00	1 Laporan	70.184.160,00	1 Laporan	71.587.843,00	1 Laporan	73.019.600,00	1 Laporan	283.599.603,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang	Banten
		5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	2 Dokumen	40.800.000,00	2 Dokumen	41.616.000,00	2 Dokumen	42.448.320,00	2 Dokumen	164.864.320,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang	Banten
		5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Pandeglang**	**100 %**	**100 %**	**1.441.862.000,00**	**100 %**	**1.456.280.620,00**	**100 %**	**1.485.406.232,00**	**100 %**	**1.500.260.295,00**	**100 %**	**5.883.809.147,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang	
		5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	12 Laporan	363.482.000,00	12 Laporan	367.116.820,00	12 Laporan	374.459.156,00	12 Laporan	378.203.748,00	12 Laporan	1.483.261.724,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang	Banten
		5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	12 Laporan	204.000.000,00	12 Laporan	206.040.000,00	12 Laporan	210.160.800,00	12 Laporan	212.262.408,00	12 Laporan	832.463.208,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang	Banten
		5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	12 Laporan	874.380.000,00	12 Laporan	883.123.800,00	12 Laporan	900.786.276,00	12 Laporan	909.794.139,00	12 Laporan	3.568.084.215,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang	Banten

		5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Pandeglang**	**100 %**	**100 %**	**167.050.000,00**	**100 %**	**170.056.900,00**	**100 %**	**173.120.597,00**	**100 %**	**176.583.009,00**	**100 %**	**686.810.506,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang	
		5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	2 Unit	33.410.000,00	2 Unit	33.744.100,00	2 Unit	34.081.541,00	2 Unit	34.763.173,00	2 Unit	135.998.814,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang	Banten
		5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	6 Unit	33.410.000,00	6 Unit	34.078.200,00	6 Unit	34.759.764,00	6 Unit	35.454.959,00	6 Unit	137.702.923,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang	Banten
		5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit	33.410.000,00	40 Unit	34.078.200,00	40 Unit	34.759.764,00	40 Unit	35.454.959,00	40 Unit	137.702.923,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang	Banten
		5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	33.410.000,00	1 Unit	34.078.200,00	1 Unit	34.759.764,00	1 Unit	35.454.959,00	1 Unit	137.702.923,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang	Banten
		5.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	33.410.000,00	1 Unit	34.078.200,00	1 Unit	34.759.764,00	1 Unit	35.454.959,00	1 Unit	137.702.923,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang	Banten
	Meningkatnya Pendapatan Daerah	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**		**-**	**-**	**1.046.310.000,00**	**-**	**1.057.293.100,00**	**-**	**1.067.968.031,00**	**-**	**1.078.751.751,00**	**-**	**4.250.322.882,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang	
		5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada UPTD PPD Pandeglang**	**100 %**	**100 %**	**1.046.310.000,00**	**100 %**	**1.057.293.100,00**	**100 %**	**1.067.968.031,00**	**100 %**	**1.078.751.751,00**	**100 %**	**4.250.322.882,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang	
		5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	24373 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	1.800.000.000,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang	Banten
		5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	14 Dokumen Ketetapan	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	120.000.000,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang	Banten
		5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	-	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	80.000.000,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang	Banten
		5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	500 Dokumen SSPD	25 Dokumen SSPD	546.310.000,00	25 Dokumen SSPD	557.293.100,00	25 Dokumen SSPD	567.968.031,00	25 Dokumen SSPD	578.751.751,00	25 Dokumen SSPD	2.250.322.882,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang	Banten
JUMLAH							**3.082.837.500,00**		**3.119.798.430,00**		**3.171.386.026,00**		**3.209.384.045,00**		**12.583.406.001,00**		

UPTD PPD RANGKASBITUNG																	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**-**	**-**	**2.439.770.144,00**	**-**	**2.491.927.147,00**	**-**	**2.545.053.754,00**	**-**	**2.599.374.415,00**	**-**	**10.076.125.460,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung	
		5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada UPTD PPD Rangkasbitung**	**100 %**	**100 %**	**462.765.760,00**	**100 %**	**472.221.075,00**	**100 %**	**481.665.497,00**	**100 %**	**491.298.807,00**	**100 %**	**1.907.951.139,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung	
		5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40.877.520,00	1 Paket	41.695.070,00	1 Paket	42.528.972,00	1 Paket	43.379.551,00	1 Paket	168.481.113,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung	Banten
		5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	195.363.660,00	1 Paket	199.270.933,00	1 Paket	203.256.352,00	1 Paket	207.321.479,00	1 Paket	805.212.424,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung	Banten
		5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.978.000,00	1 Paket	4.057.560,00	1 Paket	4.138.711,00	1 Paket	4.221.485,00	1 Paket	16.395.756,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung	Banten
		5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.681.600,00	1 Paket	31.295.232,00	1 Paket	31.921.137,00	1 Paket	32.559.559,00	1 Paket	126.457.528,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung	Banten
		5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	81.629.580,00	1 Paket	83.262.172,00	1 Paket	84.927.415,00	1 Paket	86.625.963,00	1 Paket	336.445.130,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung	Banten
		5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	59.435.400,00	1 Laporan	60.624.108,00	1 Laporan	61.836.590,00	1 Laporan	63.073.323,00	1 Laporan	244.969.421,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung	Banten
		5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	50.800.000,00	2 Dokumen	52.016.000,00	2 Dokumen	53.056.320,00	2 Dokumen	54.117.447,00	2 Dokumen	209.989.767,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung	Banten
		5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Rangkasbitung**	**100 %**	**100 %**	**1.507.863.144,00**	**100 %**	**1.538.020.407,00**	**100 %**	**1.568.780.815,00**	**100 %**	**1.600.156.431,00**	**100 %**	**6.214.820.797,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung	
		5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	491.227.104,00	12 Laporan	501.051.646,00	12 Laporan	511.072.679,00	12 Laporan	521.294.133,00	12 Laporan	2.024.645.562,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung	Banten
		5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	12 Laporan	97.053.000,00	12 Laporan	98.994.060,00	12 Laporan	100.973.941,00	12 Laporan	102.993.420,00	12 Laporan	400.014.421,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung	Banten
		5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	12 Laporan	919.583.040,00	12 Laporan	937.974.701,00	12 Laporan	956.734.195,00	12 Laporan	975.868.878,00	12 Laporan	3.790.160.814,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung	Banten

		5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Rangkasbitung**	**100 %**	**100 %**	**469.141.240,00**	**100 %**	**481.685.665,00**	**100 %**	**494.607.442,00**	**100 %**	**507.919.177,00**	**100 %**	**1.953.353.524,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung	
		5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	2 Unit	46.318.200,00	2 Unit	47.244.564,00	2 Unit	48.189.455,00	2 Unit	49.153.244,00	2 Unit	190.905.463,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung	Banten
		5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	7 Unit	159.160.800,00	7 Unit	162.344.016,00	7 Unit	165.590.896,00	7 Unit	168.902.714,00	7 Unit	655.998.426,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung	Banten
		5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	105.582.240,00	50 Unit	107.693.885,00	50 Unit	109.847.762,00	50 Unit	112.044.718,00	50 Unit	435.168.605,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung	Banten
		5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	152.600.000,00	1 Unit	155.652.000,00	1 Unit	158.765.040,00	1 Unit	161.940.341,00	1 Unit	628.957.381,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung	Banten
		5.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	5.480.000,00	1 Unit	8.751.200,00	1 Unit	12.214.289,00	1 Unit	15.878.160,00	1 Unit	42.323.649,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung	Banten
	Meningkatnya Pendapatan Daerah	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**		**-**	**-**	**1.009.000.000,00**	**-**	**1.029.180.000,00**	**-**	**1.049.763.600,00**	**-**	**1.070.758.872,00**	**-**	**4.158.702.472,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung	
		5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada UPTD PPD Rangkasbitung**	**100 %**	**100 %**	**1.009.000.000,00**	**100 %**	**1.029.180.000,00**	**100 %**	**1.049.763.600,00**	**100 %**	**1.070.758.872,00**	**100 %**	**4.158.702.472,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung	
		5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	14929 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	1.800.000.000,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung	Banten
		5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	120.000.000,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung	Banten
		5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	-	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	80.000.000,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung	Banten
		5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	300 Dokumen SSPD	13 Dokumen SSPD	509.000.000,00	13 Dokumen SSPD	529.180.000,00	13 Dokumen SSPD	549.763.600,00	13 Dokumen SSPD	570.758.872,00	13 Dokumen SSPD	2.158.702.472,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung	Banten
JUMLAH							**3.448.770.144,00**		**3.521.107.147,00**		**3.594.817.354,00**		**3.670.133.287,00**		**14.234.827.932,00**		

UPTD PPD MALINGPING																	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**-**	**-**	**3.721.185.825,00**	**-**	**3.795.609.542,00**	**-**	**3.871.521.732,00**	**-**	**3.948.952.167,00**	**-**	**15.337.269.266,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping	
		5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada UPTD PPD Malingping**	**100 %**	**100 %**	**520.838.547,00**	**100 %**	**531.255.318,00**	**100 %**	**541.880.424,00**	**100 %**	**552.718.033,00**	**100 %**	**2.146.692.322,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping	
		5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	11.765.700,00	1 Paket	12.001.015,00	1 Paket	12.241.033,00	1 Paket	12.485.856,00	1 Paket	48.493.604,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping	Banten
		5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	173.661.120,00	1 Paket	177.134.342,00	1 Paket	180.677.029,00	1 Paket	184.290.570,00	1 Paket	715.763.061,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping	Banten
		5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	27.677.807,00	1 Paket	28.231.363,00	1 Paket	28.795.991,00	1 Paket	29.371.910,00	1 Paket	114.077.071,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping	Banten
		5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	99.483.660,00	1 Paket	101.473.333,00	1 Paket	103.502.800,00	1 Paket	105.572.856,00	1 Paket	410.032.649,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping	Banten
		5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	116.650.260,00	1 Paket	118.983.265,00	1 Paket	121.362.931,00	1 Paket	123.790.188,00	1 Paket	480.786.644,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping	Banten
		5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	81.600.000,00	1 Laporan	83.232.000,00	1 Laporan	84.896.640,00	1 Laporan	86.594.573,00	1 Laporan	336.323.213,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping	Banten
		5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	2 Dokumen	10.000.000,00	2 Dokumen	10.200.000,00	2 Dokumen	10.404.000,00	2 Dokumen	10.612.080,00	2 Dokumen	41.216.080,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping	Banten
		5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Malingping**	**100 %**	**100 %**	**2.678.158.450,00**	**100 %**	**2.731.721.619,00**	**100 %**	**2.786.356.051,00**	**100 %**	**2.842.083.172,00**	**100 %**	**11.038.319.292,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping	
		5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	522.153.957,00	12 Laporan	532.597.036,00	12 Laporan	543.248.977,00	12 Laporan	554.113.956,00	12 Laporan	2.152.113.926,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping	Banten
		5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	152.316.600,00	12 Laporan	155.362.932,00	12 Laporan	158.470.191,00	12 Laporan	161.639.594,00	12 Laporan	627.789.317,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping	Banten
		5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	12 Laporan	2.003.687.893,00	12 Laporan	2.043.761.651,00	12 Laporan	2.084.636.883,00	12 Laporan	2.126.329.622,00	12 Laporan	8.258.416.049,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping	Banten

		5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Malingping**	**100 %**	**100 %**	**522.188.828,00**	**100 %**	**532.632.605,00**	**100 %**	**543.285.257,00**	**100 %**	**554.150.962,00**	**100 %**	**2.152.257.652,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping	
		5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	4 Unit	34.205.700,00	4 Unit	34.889.814,00	4 Unit	35.587.610,00	4 Unit	36.299.362,00	4 Unit	140.982.486,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping	Banten
		5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	8 Unit	200.263.128,00	8 Unit	204.268.391,00	8 Unit	208.353.758,00	8 Unit	212.520.834,00	8 Unit	825.406.111,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping	Banten
		5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	40 Unit	87.720.000,00	40 Unit	89.474.400,00	40 Unit	91.263.889,00	40 Unit	93.089.166,00	40 Unit	361.547.455,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping	Banten
		5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	150.000.000,00	1 Unit	153.000.000,00	1 Unit	156.060.000,00	1 Unit	159.181.200,00	1 Unit	618.241.200,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping	Banten
		5.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	50.000.000,00	1 Unit	51.000.000,00	1 Unit	52.020.000,00	1 Unit	53.060.400,00	1 Unit	206.080.400,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping	Banten
	Meningkatnya Pendapatan Daerah	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**		**-**	**-**	**720.735.396,00**	**-**	**735.150.104,00**	**-**	**749.853.106,00**	**-**	**764.850.168,00**	**-**	**2.970.588.774,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping	
		5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada UPTD PPD Malingping**	**100 %**	**100 %**	**720.735.396,00**	**100 %**	**735.150.104,00**	**100 %**	**749.853.106,00**	**100 %**	**764.850.168,00**	**100 %**	**2.970.588.774,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping	
		5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	8152 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	1 Laporan	250.000.000,00	1 Laporan	250.000.000,00	1 Laporan	250.000.000,00	1 Laporan	1.000.000.000,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping	Banten
		5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	16 Dokumen Ketetapan	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	120.000.000,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping	Banten
		5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	-	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	80.000.000,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping	Banten
		5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2500 Dokumen SSPD	16 Dokumen SSPD	420.735.396,00	16 Dokumen SSPD	435.150.104,00	16 Dokumen SSPD	449.853.106,00	16 Dokumen SSPD	464.850.168,00	16 Dokumen SSPD	1.770.588.774,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping	Banten
JUMLAH							**4.441.921.221,00**		**4.530.759.646,00**		**4.621.374.838,00**		**4.713.802.335,00**		**18.307.858.040,00**		

UPTD PPD CIPUTAT																	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**-**	**-**	**4.466.435.162,00**	**-**	**4.557.663.865,00**	**-**	**4.648.817.143,00**	**-**	**4.741.793.486,00**	**-**	**18.414.709.656,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat	
		5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada UPTD PPD Ciputat**	**100 %**	**100 %**	**1.128.456.914,00**	**100 %**	**1.150.926.052,00**	**100 %**	**1.173.944.573,00**	**100 %**	**1.197.423.465,00**	**100 %**	**4.650.751.004,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat	
		5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	57.905.400,00	1 Paket	59.063.508,00	1 Paket	60.244.778,00	1 Paket	61.449.674,00	1 Paket	238.663.360,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat	Banten
		5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	654.475.350,00	1 Paket	667.564.857,00	1 Paket	680.916.154,00	1 Paket	694.534.476,00	1 Paket	2.697.490.837,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat	Banten
		5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	16.391.400,00	1 Paket	16.719.228,00	1 Paket	17.053.613,00	1 Paket	17.394.685,00	1 Paket	67.558.926,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat	Banten
		5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	17.625.600,00	1 Paket	17.978.112,00	1 Paket	18.337.674,00	1 Paket	18.704.428,00	1 Paket	72.645.814,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat	Banten
		5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	257.599.164,00	1 Paket	262.751.147,00	1 Paket	268.006.170,00	1 Paket	273.366.294,00	1 Paket	1.061.722.775,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat	Banten
		5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	74.460.000,00	1 Laporan	75.949.200,00	1 Laporan	77.468.184,00	1 Laporan	79.017.548,00	1 Laporan	306.894.932,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat	Banten
		5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.900.000,00	1 Dokumen	51.918.000,00	1 Dokumen	52.956.360,00	1 Dokumen	205.774.360,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat	Banten
		5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Ciputat**	**100 %**	**100 %**	**2.148.544.048,00**	**100 %**	**2.191.514.929,00**	**100 %**	**2.235.345.228,00**	**100 %**	**2.280.052.132,00**	**100 %**	**8.855.456.337,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat	
		5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	698.906.448,00	12 Laporan	712.884.577,00	12 Laporan	727.142.269,00	12 Laporan	741.685.114,00	12 Laporan	2.880.618.408,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat	Banten
		5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	12 Laporan	493.000.000,00	12 Laporan	502.860.000,00	12 Laporan	512.917.200,00	12 Laporan	523.175.544,00	12 Laporan	2.031.952.744,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat	Banten
		5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	12 Laporan	956.637.600,00	12 Laporan	975.770.352,00	12 Laporan	995.285.759,00	12 Laporan	1.015.191.474,00	12 Laporan	3.942.885.185,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat	Banten

		5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Ciputat**	**100 %**	**100 %**	**1.189.434.200,00**	**100 %**	**1.215.222.884,00**	**100 %**	**1.239.527.342,00**	**100 %**	**1.264.317.889,00**	**100 %**	**4.908.502.315,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat	
		5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	3 Unit	46.318.200,00	3 Unit	47.244.564,00	3 Unit	48.189.455,00	3 Unit	49.153.244,00	3 Unit	190.905.463,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat	Banten
		5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	7 Unit	54.386.400,00	7 Unit	55.474.128,00	7 Unit	56.583.611,00	7 Unit	57.715.283,00	7 Unit	224.159.422,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat	Banten
		5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 Unit	80 Unit	102.285.600,00	80 Unit	104.331.312,00	80 Unit	106.417.938,00	80 Unit	108.546.297,00	80 Unit	421.581.147,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat	Banten
		5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	100.000.000,00	1 Unit	104.000.000,00	1 Unit	106.080.000,00	1 Unit	108.201.600,00	1 Unit	418.281.600,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat	Banten
		5.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	886.444.000,00	1 Unit	904.172.880,00	1 Unit	922.256.338,00	1 Unit	940.701.465,00	1 Unit	3.653.574.683,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat	Banten
	Meningkatnya Pendapatan Daerah	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**		**-**	**-**	**1.283.602.600,00**	**-**	**1.309.274.652,00**	**-**	**1.335.460.145,00**	**-**	**1.362.169.348,00**	**-**	**5.290.506.745,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat	
		5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada UPTD PPD Ciputat**	**100 %**	**100 %**	**1.283.602.600,00**	**100 %**	**1.309.274.652,00**	**100 %**	**1.335.460.145,00**	**100 %**	**1.362.169.348,00**	**100 %**	**5.290.506.745,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat	
		5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	52366 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	1.800.000.000,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat	Banten
		5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	44 Dokumen Ketetapan	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	120.000.000,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat	Banten
		5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	-	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	80.000.000,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat	Banten
		5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	22000 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	783.602.600,00	1 Dokumen SSPD	809.274.652,00	1 Dokumen SSPD	835.460.145,00	1 Dokumen SSPD	862.169.348,00	1 Dokumen SSPD	3.290.506.745,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat	Banten
JUMLAH							**5.750.037.762,00**		**5.866.938.517,00**		**5.984.277.288,00**		**6.103.962.834,00**		**23.705.216.401,00**		

UPTD PPD SERPONG																	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**100 %**	**100 %**	**3.455.388.378,00**	**100 %**	**3.524.496.146,00**	**100 %**	**3.594.986.068,00**	**100 %**	**3.666.885.790,00**	**100 %**	**14.241.756.382,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong	
		5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada UPTD PPD Serpong**	**100 %**	**100 %**	**559.953.400,00**	**100 %**	**571.152.468,00**	**100 %**	**582.575.517,00**	**100 %**	**594.227.028,00**	**100 %**	**2.307.908.413,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong	
		5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	35.806.080,00	1 Paket	36.522.202,00	1 Paket	37.252.646,00	1 Paket	37.997.699,00	1 Paket	147.578.627,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong	Banten
		5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	204.734.400,00	1 Paket	208.829.088,00	1 Paket	213.005.670,00	1 Paket	217.265.783,00	1 Paket	843.834.941,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong	Banten
		5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	28.203.000,00	1 Paket	28.767.060,00	1 Paket	29.342.401,00	1 Paket	29.929.249,00	1 Paket	116.241.710,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong	Banten
		5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	47.736.000,00	1 Paket	48.690.720,00	1 Paket	49.664.534,00	1 Paket	50.657.825,00	1 Paket	196.749.079,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong	Banten
		5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	99.078.720,00	1 Paket	101.060.294,00	1 Paket	103.081.500,00	1 Paket	105.143.130,00	1 Paket	408.363.644,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong	Banten
		5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	66.096.000,00	1 Laporan	67.417.920,00	1 Laporan	68.766.278,00	1 Laporan	70.141.604,00	1 Laporan	272.421.802,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong	Banten
		5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	22 Dokumen	2 Dokumen	78.299.200,00	2 Dokumen	79.865.184,00	2 Dokumen	81.462.488,00	2 Dokumen	83.091.738,00	2 Dokumen	322.718.610,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong	Banten
		5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Serpong**	**100 %**	**100 %**	**1.920.162.538,00**	**100 %**	**1.958.565.789,00**	**100 %**	**1.997.737.104,00**	**100 %**	**2.037.691.846,00**	**100 %**	**7.914.157.277,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong	
		5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	663.685.738,00	12 Laporan	676.959.453,00	12 Laporan	690.498.642,00	12 Laporan	704.308.614,00	12 Laporan	2.735.452.447,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong	Banten
		5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	590.376.000,00	12 Laporan	602.183.520,00	12 Laporan	614.227.190,00	12 Laporan	626.511.734,00	12 Laporan	2.433.298.444,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong	Banten
		5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	12 Laporan	666.100.800,00	12 Laporan	679.422.816,00	12 Laporan	693.011.272,00	12 Laporan	706.871.498,00	12 Laporan	2.745.406.386,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong	Banten

		5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Serpong**	**100 %**	**100 %**	**975.272.440,00**	**100 %**	**994.777.889,00**	**100 %**	**1.014.673.447,00**	**100 %**	**1.034.966.916,00**	**100 %**	**4.019.690.692,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong	
		5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	5 Unit	40.664.200,00	5 Unit	41.477.484,00	5 Unit	42.307.034,00	5 Unit	43.153.174,00	5 Unit	167.601.892,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong	Banten
		5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	9 Unit	181.345.800,00	9 Unit	184.972.716,00	9 Unit	188.672.170,00	9 Unit	192.445.614,00	9 Unit	747.436.300,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong	Banten
		5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 Unit	90 Unit	88.425.840,00	90 Unit	90.194.357,00	90 Unit	91.998.244,00	90 Unit	93.838.209,00	90 Unit	364.456.650,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong	Banten
		5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	381.316.800,00	1 Unit	388.943.136,00	1 Unit	396.721.999,00	1 Unit	404.656.439,00	1 Unit	1.571.638.374,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong	Banten
		5.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1 Unit	283.519.800,00	1 Unit	289.190.196,00	1 Unit	294.974.000,00	1 Unit	300.873.480,00	1 Unit	1.168.557.476,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong	Banten
	Meningkatnya Pendapatan Daerah	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**		**-**	**-**	**1.169.020.000,00**	**-**	**1.192.400.400,00**	**-**	**1.216.248.408,00**	**-**	**1.240.573.376,00**	**-**	**4.818.242.184,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong	
		5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada UPTD PPD Serpong**	**100 %**	**100 %**	**1.169.020.000,00**	**100 %**	**1.192.400.400,00**	**100 %**	**1.216.248.408,00**	**100 %**	**1.240.573.376,00**	**100 %**	**4.818.242.184,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong	
		5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	52366 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	1.800.000.000,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong	Banten
		5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	44 Dokumen Ketetapan	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	120.000.000,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong	Banten
		5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	-	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	80.000.000,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong	Banten
		5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	22000 Dokumen SSPD	7 Dokumen SSPD	669.020.000,00	7 Dokumen SSPD	692.400.400,00	7 Dokumen SSPD	716.248.408,00	7 Dokumen SSPD	740.573.376,00	7 Dokumen SSPD	2.818.242.184,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong	Banten
JUMLAH							**4.624.408.378,00**		**4.716.896.546,00**		**4.811.234.476,00**		**4.907.459.166,00**		**19.059.998.566,00**		

UPTD PPD BALARAJA																	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**-**	**-**	**3.362.903.891,00**	**-**	**3.430.161.969,00**	**-**	**3.498.765.209,00**	**-**	**3.568.740.512,00**	**-**	**13.860.571.581,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja	
		5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada UPTD PPD Balaraja**	**100 %**	**100 %**	**422.559.000,00**	**100 %**	**431.010.180,00**	**100 %**	**439.630.384,00**	**100 %**	**448.422.991,00**	**100 %**	**1.741.622.555,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja	
		5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.437.000,00	1 Paket	4.525.740,00	1 Paket	4.616.255,00	1 Paket	4.708.580,00	1 Paket	18.287.575,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja	Banten
		5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	218.263.680,00	1 Paket	222.628.954,00	1 Paket	227.081.533,00	1 Paket	231.623.163,00	1 Paket	899.597.330,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja	Banten
		5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	3.637.320,00	1 Paket	3.710.066,00	1 Paket	3.784.268,00	1 Paket	3.859.953,00	1 Paket	14.991.607,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja	Banten
		5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	45.288.000,00	1 Paket	46.193.760,00	1 Paket	47.117.635,00	1 Paket	48.059.988,00	1 Paket	186.659.383,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja	Banten
		5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.045.000,00	1 Paket	15.345.900,00	1 Paket	15.652.818,00	1 Paket	15.965.874,00	1 Paket	62.009.592,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja	Banten
		5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	75.888.000,00	1 Laporan	77.405.760,00	1 Laporan	78.953.875,00	1 Laporan	80.532.953,00	1 Laporan	312.780.588,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja	Banten
		5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	2 Dokumen	60.000.000,00	2 Dokumen	61.200.000,00	2 Dokumen	62.424.000,00	2 Dokumen	63.672.480,00	2 Dokumen	247.296.480,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja	Banten
		5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Balaraja**	**100 %**	**100 %**	**2.240.197.691,00**	**100 %**	**2.285.001.645,00**	**100 %**	**2.330.701.678,00**	**100 %**	**2.377.315.711,00**	**100 %**	**9.233.216.725,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja	
		5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	720.801.611,00	12 Laporan	735.217.643,00	12 Laporan	749.921.996,00	12 Laporan	764.920.436,00	12 Laporan	2.970.861.686,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja	Banten
		5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	12 Laporan	450.840.000,00	12 Laporan	459.856.800,00	12 Laporan	469.053.936,00	12 Laporan	478.435.015,00	12 Laporan	1.858.185.751,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja	Banten
		5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	12 Laporan	1.068.556.080,00	12 Laporan	1.089.927.202,00	12 Laporan	1.111.725.746,00	12 Laporan	1.133.960.260,00	12 Laporan	4.404.169.288,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja	Banten

		5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Balaraja**	**100 %**	**100 %**	**700.147.200,00**	**100 %**	**714.150.144,00**	**100 %**	**728.433.147,00**	**100 %**	**743.001.810,00**	**100 %**	**2.885.732.301,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja	
		5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	68.156.400,00	2 Unit	69.519.528,00	2 Unit	70.909.919,00	2 Unit	72.328.117,00	2 Unit	280.913.964,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja	Banten
		5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	79.111.200,00	5 Unit	80.693.424,00	5 Unit	82.307.292,00	5 Unit	83.953.438,00	5 Unit	326.065.354,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja	Banten
		5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	80 Unit	93.207.600,00	80 Unit	95.071.752,00	80 Unit	96.973.187,00	80 Unit	98.912.651,00	80 Unit	384.165.190,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja	Banten
		5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	150.000.000,00	1 Unit	153.000.000,00	1 Unit	156.060.000,00	1 Unit	159.181.200,00	1 Unit	618.241.200,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja	Banten
		5.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	309.672.000,00	1 Unit	315.865.440,00	1 Unit	322.182.749,00	1 Unit	328.626.404,00	1 Unit	1.276.346.593,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja	Banten
	Meningkatnya Pendapatan Daerah	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**		**-**	**-**	**1.149.746.980,00**	**-**	**1.172.741.920,00**	**-**	**1.196.196.758,00**	**-**	**1.220.120.693,00**	**-**	**4.738.806.351,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja	
		5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada UPTD PPD Balaraja**	**100 Aduan**	**100 Aduan**	**1.149.746.980,00**	**100 Aduan**	**1.172.741.920,00**	**100 Aduan**	**1.196.196.758,00**	**100 Aduan**	**1.220.120.693,00**	**100 Aduan**	**4.738.806.351,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja	
		5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	57088 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	1.800.000.000,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja	Banten
		5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	20 Dokumen Ketetapan	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	120.000.000,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja	Banten
		5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	-	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	80.000.000,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja	Banten
		5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	600 Dokumen SSPD	20 Dokumen SSPD	649.746.980,00	20 Dokumen SSPD	672.741.920,00	20 Dokumen SSPD	696.196.758,00	20 Dokumen SSPD	720.120.693,00	20 Dokumen SSPD	2.738.806.351,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja	Banten
JUMLAH							**4.512.650.871,00**		**4.602.903.889,00**		**4.694.961.967,00**		**4.788.861.205,00**		**18.599.377.932,00**		

UPTD PPD CIKOKOL																	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**-**	**-**	**2.463.755.658,00**	**-**	**2.513.030.771,00**	**-**	**2.563.291.386,00**	**-**	**2.614.557.214,00**	**-**	**10.154.635.029,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol	
		5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada UPTD PPD Cikokol**	**100 %**	**100 %**	**374.577.784,00**	**100 %**	**382.069.340,00**	**100 %**	**389.710.726,00**	**100 %**	**397.504.941,00**	**100 %**	**1.543.862.791,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol	
		5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.805.040,00	1 Paket	7.961.141,00	1 Paket	8.120.364,00	1 Paket	8.282.771,00	1 Paket	32.169.316,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol	Banten
		5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	167.130.184,00	1 Paket	170.472.788,00	1 Paket	173.882.242,00	1 Paket	177.359.889,00	1 Paket	688.845.103,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol	Banten
		5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14.960.340,00	1 Paket	15.259.547,00	1 Paket	15.564.738,00	1 Paket	15.876.032,00	1 Paket	61.660.657,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol	Banten
		5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	1 Paket	69.232.500,00	1 Paket	70.617.150,00	1 Paket	72.029.493,00	1 Paket	73.470.083,00	1 Paket	285.349.226,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol	Banten
		5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	1 Paket	17.764.320,00	1 Paket	18.119.606,00	1 Paket	18.481.999,00	1 Paket	18.851.638,00	1 Paket	73.217.563,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol	Banten
		5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2 Laporan	31.671.000,00	2 Laporan	32.304.420,00	2 Laporan	32.950.508,00	2 Laporan	33.609.519,00	2 Laporan	130.535.447,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol	Banten
		5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	66.014.400,00	2 Dokumen	67.334.688,00	2 Dokumen	68.681.382,00	2 Dokumen	70.055.009,00	2 Dokumen	272.085.479,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol	Banten
		5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Cikokol**	**100 %**	**100 %**	**1.457.040.818,00**	**100 %**	**1.486.181.634,00**	**100 %**	**1.515.905.267,00**	**100 %**	**1.546.223.372,00**	**100 %**	**6.005.351.091,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol	
		5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	636.783.960,00	12 Laporan	649.519.639,00	12 Laporan	662.510.032,00	12 Laporan	675.760.233,00	12 Laporan	2.624.573.864,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol	Banten
		5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	239.756.498,00	12 Laporan	244.551.628,00	12 Laporan	249.442.660,00	12 Laporan	254.431.514,00	12 Laporan	988.182.300,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol	Banten
		5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	112 Laporan	12 Laporan	580.500.360,00	12 Laporan	592.110.367,00	12 Laporan	603.952.575,00	12 Laporan	616.031.625,00	12 Laporan	2.392.594.927,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol	Banten

		5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Cikokol**	**100 %**	**100 %**	**632.137.056,00**	**100 %**	**644.779.797,00**	**100 %**	**657.675.393,00**	**100 %**	**670.828.901,00**	**100 %**	**2.605.421.147,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol	
		5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	3 Unit	34.078.200,00	3 Unit	34.759.764,00	3 Unit	35.454.959,00	3 Unit	36.164.058,00	3 Unit	140.456.981,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol	Banten
		5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	12 Unit	136.312.800,00	12 Unit	139.039.056,00	12 Unit	141.819.837,00	12 Unit	144.656.235,00	12 Unit	561.827.928,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol	Banten
		5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	111 Unit	90 Unit	105.967.800,00	90 Unit	108.087.156,00	90 Unit	110.248.899,00	90 Unit	112.453.877,00	90 Unit	436.757.732,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol	
		5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	280.778.256,00	1 Unit	286.393.821,00	1 Unit	292.121.698,00	1 Unit	297.964.131,00	1 Unit	1.157.257.906,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol	Banten
		5.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	75.000.000,00	1 Unit	76.500.000,00	1 Unit	78.030.000,00	1 Unit	79.590.600,00	1 Unit	309.120.600,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol	Banten
	Meningkatnya Pendapatan Daerah	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**		**-**	**-**	**1.082.346.400,00**	**-**	**1.103.993.328,00**	**-**	**1.126.073.195,00**	**-**	**1.148.594.658,00**	**-**	**4.461.007.581,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol	
		5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada UPTD PPD Cikokol**	**100 %**	**100 %**	**1.082.346.400,00**	**100 %**	**1.103.993.328,00**	**100 %**	**1.126.073.195,00**	**100 %**	**1.148.594.658,00**	**100 %**	**4.461.007.581,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol	
		5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	53117 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	1.800.000.000,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol	Banten
		5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	5 Dokumen Ketetapan	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	120.000.000,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol	Banten
		5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	-	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	80.000.000,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol	Banten
		5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	45000 Dokumen SSPD	42 Dokumen SSPD	582.346.400,00	42 Dokumen SSPD	603.993.328,00	42 Dokumen SSPD	626.073.195,00	42 Dokumen SSPD	648.594.658,00	42 Dokumen SSPD	2.461.007.581,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol	Banten
JUMLAH							**3.546.102.058,00**		**3.617.024.099,00**		**3.689.364.581,00**		**3.763.151.872,00**		**14.615.642.610,00**		

UPTD PPD CILEDUG																	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**-**	**-**	**2.717.464.011,00**	**-**	**2.769.563.292,00**	**-**	**2.822.682.057,00**	**-**	**2.876.840.474,00**	**-**	**11.186.549.834,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug	
		5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada UPTD PPD Ciledug**	**100 %**	**100 %**	**422.169.440,00**	**100 %**	**430.612.829,00**	**100 %**	**439.225.085,00**	**100 %**	**448.009.587,00**	**100 %**	**1.740.016.941,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug	
		5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.196.940,00	1 Paket	10.400.879,00	1 Paket	10.608.896,00	1 Paket	10.821.074,00	1 Paket	42.027.789,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug	Banten
		5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	213.874.620,00	1 Paket	218.152.112,00	1 Paket	222.515.155,00	1 Paket	226.965.458,00	1 Paket	881.507.345,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug	Banten
		5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.836.000,00	1 Paket	1.872.720,00	1 Paket	1.910.174,00	1 Paket	1.948.378,00	1 Paket	7.567.272,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug	Banten
		5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.300.000,00	1 Paket	15.606.000,00	1 Paket	15.918.120,00	1 Paket	16.236.482,00	1 Paket	63.060.602,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug	Banten
		5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	96.587.880,00	1 Paket	98.519.638,00	1 Paket	100.490.030,00	1 Paket	102.499.831,00	1 Paket	398.097.379,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug	Banten
		5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	34.374.000,00	1 Laporan	35.061.480,00	1 Laporan	35.762.710,00	1 Laporan	36.477.964,00	1 Laporan	141.676.154,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug	Banten
		5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	51.000.000,00	1 Dokumen	52.020.000,00	1 Dokumen	53.060.400,00	1 Dokumen	206.080.400,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug	Banten
		5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Ciledug**	**100 %**	**100 %**	**1.758.307.171,00**	**100 %**	**1.793.473.315,00**	**100 %**	**1.829.342.781,00**	**100 %**	**1.865.929.637,00**	**100 %**	**7.247.052.904,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug	
		5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	656.784.691,00	12 Laporan	669.920.385,00	12 Laporan	683.318.793,00	12 Laporan	696.985.169,00	12 Laporan	2.707.009.038,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug	Banten
		5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	185.844.000,00	12 Laporan	189.560.880,00	12 Laporan	193.352.098,00	12 Laporan	197.219.140,00	12 Laporan	765.976.118,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug	Banten
		5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	12 Laporan	915.678.480,00	12 Laporan	933.992.050,00	12 Laporan	952.671.890,00	12 Laporan	971.725.328,00	12 Laporan	3.774.067.748,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug	Banten

		5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Ciledug**	**100 %**	**100 %**	**536.987.400,00**	**100 %**	**545.477.148,00**	**100 %**	**554.114.191,00**	**100 %**	**562.901.250,00**	**100 %**	**2.199.479.989,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug	
		5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	3 Unit	119.574.600,00	3 Unit	121.966.092,00	3 Unit	124.405.414,00	3 Unit	126.893.522,00	3 Unit	492.839.628,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug	Banten
		5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	5 Unit	79.111.200,00	5 Unit	80.693.424,00	5 Unit	82.307.292,00	5 Unit	83.953.438,00	5 Unit	326.065.354,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug	Banten
		5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	5 Unit	79.111.200,00	5 Unit	80.693.424,00	5 Unit	82.307.292,00	5 Unit	83.953.438,00	5 Unit	326.065.354,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug	Banten
		5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	184.190.400,00	1 Unit	186.374.208,00	1 Unit	188.586.693,00	1 Unit	190.828.277,00	1 Unit	749.979.578,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug	Banten
		5.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	75.000.000,00	1 Unit	75.750.000,00	1 Unit	76.507.500,00	1 Unit	77.272.575,00	1 Unit	304.530.075,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug	Banten
	Meningkatnya Pendapatan Daerah	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**		**-**	**-**	**1.138.160.800,00**	**-**	**1.160.924.016,00**	**-**	**1.184.142.496,00**	**-**	**1.207.825.346,00**	**-**	**4.691.052.658,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug	
		5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada UPTD PPD Ciledug**	**100 %**	**100 %**	**1.138.160.800,00**	**100 %**	**1.160.924.016,00**	**100 %**	**1.184.142.496,00**	**100 %**	**1.207.825.346,00**	**100 %**	**4.691.052.658,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug	
		5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	19850 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	1.800.000.000,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug	Banten
		5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	6 Dokumen Ketetapan	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	120.000.000,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug	Banten
		5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	-	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	80.000.000,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug	Banten
		5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2500 Dokumen SSPD	6 Dokumen SSPD	638.160.800,00	6 Dokumen SSPD	660.924.016,00	6 Dokumen SSPD	684.142.496,00	6 Dokumen SSPD	707.825.346,00	6 Dokumen SSPD	2.691.052.658,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug	Banten
JUMLAH							**3.855.624.811,00**		**3.930.487.308,00**		**4.006.824.553,00**		**4.084.665.820,00**		**15.877.602.492,00**		

UPTD PPD CILEGON																	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**100 %**	**100 %**	**3.130.573.594,00**	**100 %**	**3.194.295.066,00**	**100 %**	**3.259.335.367,00**	**100 %**	**3.325.722.650,00**	**100 %**	**12.909.926.677,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon	
		5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada UPTD PPD Cilegon**	**100 %**	**100 %**	**629.161.906,00**	**100 %**	**641.745.144,00**	**100 %**	**654.580.047,00**	**100 %**	**667.671.647,00**	**100 %**	**2.593.158.744,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon	
		5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	22.428.780,00	1 Paket	22.877.356,00	1 Paket	23.334.903,00	1 Paket	23.801.601,00	1 Paket	92.442.640,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon	Banten
		5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	232.965.142,00	1 Paket	237.624.444,00	1 Paket	242.376.934,00	1 Paket	247.224.471,00	1 Paket	960.190.991,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon	Banten
		5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	31.899.684,00	1 Paket	32.537.678,00	1 Paket	33.188.431,00	1 Paket	33.852.200,00	1 Paket	131.477.993,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon	Banten
		5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	59.058.000,00	1 Paket	60.239.160,00	1 Paket	61.443.943,00	1 Paket	62.672.822,00	1 Paket	243.413.925,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon	Banten
		5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	160.349.100,00	1 Paket	163.556.082,00	1 Paket	166.827.204,00	1 Paket	170.163.748,00	1 Paket	660.896.134,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon	Banten
		5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	85.741.200,00	1 Laporan	87.456.024,00	1 Laporan	89.205.144,00	1 Laporan	90.989.247,00	1 Laporan	353.391.615,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon	Banten
		5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	36.720.000,00	2 Dokumen	37.454.400,00	2 Dokumen	38.203.488,00	2 Dokumen	38.967.558,00	2 Dokumen	151.345.446,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon	Banten
		5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Cilegon**	**100 %**	**100 %**	**1.427.891.688,00**	**100 %**	**1.456.449.522,00**	**100 %**	**1.485.578.512,00**	**100 %**	**1.515.290.083,00**	**100 %**	**5.885.209.805,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon	
		5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	564.010.278,00	12 Laporan	575.290.483,00	12 Laporan	586.796.292,00	12 Laporan	598.532.218,00	12 Laporan	2.324.629.271,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon	Banten
		5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	12 Laporan	237.597.331,00	12 Laporan	242.349.278,00	12 Laporan	247.196.263,00	12 Laporan	252.140.189,00	12 Laporan	979.283.061,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon	Banten
		5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	12 Laporan	626.284.079,00	12 Laporan	638.809.761,00	12 Laporan	651.585.957,00	12 Laporan	664.617.676,00	12 Laporan	2.581.297.473,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon	Banten

		5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Cilegon**	**100 %**	**100 %**	**1.073.520.000,00**	**100 %**	**1.096.100.400,00**	**100 %**	**1.119.176.808,00**	**100 %**	**1.142.760.920,00**	**100 %**	**4.431.558.128,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon	
		5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	3 Unit	46.318.200,00	3 Unit	47.244.564,00	3 Unit	48.189.455,00	3 Unit	49.153.244,00	3 Unit	190.905.463,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon	Banten
		5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	5 Unit	112.597.800,00	5 Unit	114.849.756,00	5 Unit	117.146.751,00	5 Unit	119.489.686,00	5 Unit	464.083.993,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon	Banten
		5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	184.104.000,00	50 Unit	187.786.080,00	50 Unit	191.541.802,00	50 Unit	195.372.638,00	50 Unit	758.804.520,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon	Banten
		5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	150.000.000,00	1 Unit	153.000.000,00	1 Unit	156.060.000,00	1 Unit	159.181.200,00	1 Unit	618.241.200,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon	Banten
		5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	55.500.000,00	1 Unit	57.720.000,00	1 Unit	60.028.800,00	1 Unit	62.429.952,00	1 Unit	235.678.752,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon	Banten
		5.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	525.000.000,00	1 Unit	535.500.000,00	1 Unit	546.210.000,00	1 Unit	557.134.200,00	1 Unit	2.163.844.200,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon	Banten
	Meningkatnya Pendapatan Daerah	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**		**-**	**-**	**1.130.875.144,00**	**-**	**1.153.492.647,00**	**-**	**1.176.562.500,00**	**-**	**1.200.093.750,00**	**-**	**4.661.024.041,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon	
		5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada UPTD PPD Cilegon**	**100 Aduan**	**100 Aduan**	**1.130.875.144,00**	**100 Aduan**	**1.153.492.647,00**	**100 Aduan**	**1.176.562.500,00**	**100 Aduan**	**1.200.093.750,00**	**100 Aduan**	**4.661.024.041,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon	
		5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	13200 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	1.800.000.000,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon	Banten
		5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen Ketetapan	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	120.000.000,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon	Banten
		5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	-	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	80.000.000,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon	Banten
		5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	7150 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	630.875.144,00	1 Dokumen SSPD	653.492.647,00	1 Dokumen SSPD	676.562.500,00	1 Dokumen SSPD	700.093.750,00	1 Dokumen SSPD	2.661.024.041,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon	Banten
JUMLAH							**4.261.448.738,00**		**4.347.787.713,00**		**4.435.897.867,00**		**4.525.816.400,00**		**17.570.950.718,00**		

UPTD PPD KELAPA DUA																	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**-**	**-**	**4.323.180.160,00**	**-**	**4.409.643.763,00**	**-**	**4.497.836.638,00**	**-**	**4.587.793.372,00**	**-**	**17.818.453.933,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua	
		5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada UPTD PPD Kelapa Dua**	**100 %**	**100 %**	**746.837.800,00**	**100 %**	**761.774.556,00**	**100 %**	**777.010.047,00**	**100 %**	**792.550.248,00**	**100 %**	**3.078.172.651,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua	
		5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10.200.000,00	12 Paket	10.404.000,00	12 Paket	10.612.080,00	12 Paket	10.824.322,00	12 Paket	42.040.402,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua	Banten
		5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1 Paket	251.015.800,00	1 Paket	256.036.116,00	1 Paket	261.156.838,00	1 Paket	266.379.975,00	1 Paket	1.034.588.729,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua	Banten
		5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	1 Paket	57.120.000,00	1 Paket	58.262.400,00	1 Paket	59.427.648,00	1 Paket	60.616.201,00	1 Paket	235.426.249,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua	Banten
		5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	1 Paket	140.964.000,00	1 Paket	143.783.280,00	1 Paket	146.658.946,00	1 Paket	149.592.125,00	1 Paket	580.998.351,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua	Banten
		5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	1 Paket	103.020.000,00	1 Paket	105.080.400,00	1 Paket	107.182.008,00	1 Paket	109.325.648,00	1 Paket	424.608.056,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua	Banten
		5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1 Laporan	167.688.000,00	1 Laporan	171.041.760,00	1 Laporan	174.462.595,00	1 Laporan	177.951.847,00	1 Laporan	691.144.202,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua	Banten
		5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	2 Dokumen	16.830.000,00	2 Dokumen	17.166.600,00	2 Dokumen	17.509.932,00	2 Dokumen	17.860.130,00	2 Dokumen	69.366.662,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua	Banten
		5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Kelapa Dua**	**100 %**	**100 %**	**2.773.801.260,00**	**100 %**	**2.829.277.285,00**	**100 %**	**2.885.862.831,00**	**100 %**	**2.943.580.088,00**	**100 %**	**11.432.521.464,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua	
		5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	866.852.100,00	12 Laporan	884.189.142,00	12 Laporan	901.872.925,00	12 Laporan	919.910.383,00	12 Laporan	3.572.824.550,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua	Banten
		5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	796.150.800,00	12 Laporan	812.073.816,00	12 Laporan	828.315.292,00	12 Laporan	844.881.598,00	12 Laporan	3.281.421.506,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua	Banten
		5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.110.798.360,00	12 Laporan	1.133.014.327,00	12 Laporan	1.155.674.614,00	12 Laporan	1.178.788.107,00	12 Laporan	4.578.275.408,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua	Banten

		5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Kelapa Dua**	**100 %**	**100 %**	**802.541.100,00**	**100 %**	**818.591.922,00**	**100 %**	**834.963.760,00**	**100 %**	**851.663.036,00**	**100 %**	**3.307.759.818,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua	
		5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	41.218.200,00	1 Unit	42.042.564,00	1 Unit	42.883.415,00	1 Unit	43.741.084,00	1 Unit	169.885.263,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua	Banten
		5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	7 Unit	181.345.800,00	7 Unit	184.972.716,00	7 Unit	188.672.170,00	7 Unit	192.445.614,00	7 Unit	747.436.300,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua	Banten
		5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	240 Unit	120 Unit	153.081.600,00	130 Unit	156.143.232,00	135 Unit	159.266.097,00	140 Unit	162.451.419,00	140 Unit	630.942.348,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua	Banten
		5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	404.940.000,00	1 Unit	413.038.800,00	1 Unit	421.299.576,00	1 Unit	429.725.568,00	1 Unit	1.669.003.944,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua	Banten
		5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	21.955.500,00	1 Unit	22.394.610,00	1 Unit	22.842.502,00	1 Unit	23.299.351,00	1 Unit	90.491.963,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua	Banten
	Meningkatnya Pendapatan Daerah	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Peningkatan Pajak Daerah**	**8 %**	**5,85 %**	**1.174.873.200,00**	**5,85 %**	**1.401.374.104,00**	**5,35 %**	**1.537.576.754,00**	**5,35 %**	**1.553.226.704,00**	**5,35 %**	**5.667.050.762,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua	
		5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pada UPTD PPD Kelapa Dua**	**100 %**	**100 %**	**1.174.873.200,00**	**100 %**	**1.401.374.104,00**	**100 %**	**1.537.576.754,00**	**100 %**	**1.553.226.704,00**	**100 %**	**5.667.050.762,00**	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua	
		5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	1.800.000.000,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua	Banten
		5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	2 Dokumen Ketetapan	120.000.000,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua	Banten
		5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	-	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	80.000.000,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua	Banten
		5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	308 Dokumen SSPD	11 Dokumen SSPD	674.873.200,00	11 Dokumen SSPD	901.374.104,00	11 Dokumen SSPD	1.037.576.754,00	11 Dokumen SSPD	1.053.226.704,00	11 Dokumen SSPD	3.667.050.762,00	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua	Banten
JUMLAH							**5.498.053.360,00**		**5.811.017.867,00**		**6.035.413.392,00**		**6.141.020.076,00**		**23.485.504.695,00**		
TOTAL							**311.802.338.000,00**		**313.299.869.002,00**		**305.925.144.998,00**		**322.460.554.000,00**		**1.253.487.906.000,00**		

BAB VII

7.1 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai landasan pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten adalah ukuran atas keberhasilan yang dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh masing-masing bidang. Indikator Kinerja Utama menggambarkan tingkat capaian lingkup tujuan (Badan pendapatan Daerah) dan lingkup sasaran (Bidang-bidang). Untuk itu IKU harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah selesainya kegiatan. Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 disajikan pada Tabel 7.1.1

Tabel 7.1.1
Indikator Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Banten
Tahun 2023 s/d 2026

INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	***SATUAN***	***BASELINE***	***TARGET***				***KONDISI AKHIR***
		2021	***2023***	***2024***	***2025***	***2026***	
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***
Indeks Reformasi Birokrasi	nilai	60	72,50	75,00	77,50	80,00	80,00
Indeks Kemandirian Keuangan Daerah	%	60,29	69,73	69,26	68,81	68,39	68,39
Persentase Peningkatan Pajak Daerah	%	8,00	5,85	5,85	5,35	5,35	5,35
Presentase Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain (%)	%	2,96	2,90	4,56	4,57	4,56	4,56

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten pada setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Dalam penyusunan Perubahan Renstra Tahun 2023-2026 ini masih menggunakan Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, namun dalam penyusunan Renstra ini direncanakan ada penyesuaian Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) dengan mengacu pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan.

Meskipun demikian, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten menyadari masih terdapat kekurangan dari apa yang disajikan.

Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran yang dapat menyempurnakan Perubahan Renstra ini, agar tercapainya tujuan "***Banten yang Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa*".**